



Kementerian PPN/
Bappenas

Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Provinsi Aceh



Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)



Kementerian PPN/
Bappenas

Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Provinsi Aceh



Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Pengarah:

Erwin Dimas

Penanggung Jawab:

Agustin Arry Yanna

Tim Pelaksana:

Dwi Ratih Suryantining Esti

Yudhie Hatmadji Sudjarwo

Andi Setyo Pambudi

Yulia Agnis Sutarno

Grace Second Lady Manalu

Rahmat Hidayat

Andreas Rudika Ardiyanto

Amelia Ari Putri

Staf Pendukung:

Dewi Nurlina

Fahmi Rohman Bimantoro

Wahyu Sabtika

M. Yusuf Zaky Amanullah

M. Munawir Amin

Aulia Rachma Pramudya

Gian Fany

M. Zulfikar Ihsan

R. Arvin Rizky A

Informasi selanjutnya, hubungi:

Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD),

Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Kementerian PPN/Bappenas

e-mail: dit.peppd@bappenas.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam perencanaan pembangunan, evaluasi merupakan salah satu tahapan penting yang tidak dapat dipisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan. Evaluasi dilakukan sebagai upaya menilai capaian tujuan pembangunan nasional dan menganalisis permasalahan serta faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Evaluasi juga berguna sebagai umpan balik dan pembelajaran untuk perbaikan perencanaan pembangunan pada tahap berikutnya.

Untuk memberikan informasi pembangunan daerah, Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah melaksanakan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD). Salah satu cakupan EPD adalah melakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di 34 Provinsi. Laporan ini merupakan *series* laporan EKPD 34 Provinsi yang berfokus pada evaluasi *on going* pencapaian kinerja utama daerah tahun 2022 yang berdasarkan pada kerangka RKP 2022. Laporan EKPD tahun 2022 mencakup informasi pencapaian sasaran pengembangan wilayah, identifikasi faktor pendukung, dan identifikasi isu strategis daerah.

Hasil EKPD diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif kondisi di daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut dalam perencanaan di periode berikutnya. Ke depannya, EKPD akan terus diperkuat sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan *evidence-based policymaking* baik dalam perencanaan pembangunan maupun penganggaran.

Sebagai penutup, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusunan laporan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang membangun dari pengguna hasil evaluasi, sangat kami harapkan agar tujuan evaluasi dapat tercapai.

Jakarta, Desember 2023
Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah,



Agustin Arry Yanna

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL	6
GLOSARIUM	7
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Hasil yang Diharapkan	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Batasan Evaluasi	4
BAB II.....	8
2.1. Metode Pengumpulan Data	8
2.2. Metode Analisis	9
2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	18
BAB III.....	22
3. 1. Hasil Skoring Kinerja Capaian Daerah.....	22
3. 2. Hasil Skoring Faktor Pendukung	29
3. 3. Analisis Faktor Pendukung	31
3. 4. Analisis <i>Time Series</i> Kinerja Daerah.....	38
3. 5. Isu Strategis	45
BAB IV.....	51
4. 1 Kesimpulan.....	51
4. 2 Rekomendasi.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prioritas RKP Tahun 2023	2
Gambar 1.2 Kerangka Logis EKPD 2023	2
Gambar 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi	3
Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data yang digunakan dalam analisis	9
Tabel 2.2 Indikator Faktor Pendukung	15
Tabel 2.3 Pengelompokan Skoring Faktor Pendukung	20
Tabel 3.1 Skoring Kinerja Capaian Tahun 2023	25
Tabel 3.2 Ringkasan Skoring Faktor Pendukung	25
Tabel 3.3 Skor Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi	26
Tabel 3.4 Skor Dimensi Sosio - Demografi	26
Tabel 3.5 Skor Dimensi Tata Kelola dan Pendanaan	27

GLOSARIUM

<i>Adequate Disclosures</i>	: Kecukupan Pengungkapan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	: Bank Indonesia
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
COVID-19	: Jenis virus dari Coronavirus disebabkan oleh SARS-CoV-2 dan teridentifikasi pada tahun 2019
Daring	: Dalam jaringan; Terhubung dengan jejaring komputer, internet, dan sebagainya
DAU	: Dana Alokasi Umum
EKPD	: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
HBKN	: Hari Besar Keagamaan Nasional
<i>Herd Immunity</i>	: Sejumlah besar populasi di sebuah area, kebal terhadap penyakit tertentu
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IDD	: Indeks Demokrasi Daerah
IDSD	: Indeks Daya Saing Daerah
IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IKM	: Industri Kecil dan Menengah
IKTL	: Indeks Kualitas Tutupan lahan
IKRT	: Industri Kecil dan Rumah Tangga
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPP	: Indeks Pembangunan Pemuda
IRB	: Indeks Reformasi Birokrasi
IRBI	: Indeks Risiko Bencana Indonesia
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional

KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
KFD	: Kapasitas Fiskal Daerah
KKN	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme
K/L	: Kementerian/Lembaga
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPBPB	: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Kuratif	: Mempunyai daya untuk mengobati atau menjadi solusi
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LNPRT	: Lembaga <i>NonProfit</i> yang Melayani Rumah Tangga
LPE	: Laju Pertumbuhan Ekonomi
Luring	: Luar Jaringan; Terputus dari jejaring komputer, internet, dan sebagainya
Menteri PPN	: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
<i>Mixed Method</i>	: Campuran metode; Terdiri dari beberapa metode
MP	: <i>Major Project</i>
MRO	: <i>Maintenance, Repair, and Overhaul</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Daerah
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PN	: Prioritas Nasional
PP	: Peraturan Pemerintah
PSN	: Proyek Strategis Nasional
RI	: Republik Indonesia
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SCM	: <i>Success Case Method</i>

SD	: Sekolah Dasar
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah
SK	: Surat Keputusan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SPPN	: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
THIS	: Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial
TK	: Tingkat Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
UHH	: Umur Harapan Hidup
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”



Kementerian PPN/
Bappenas

EPD

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

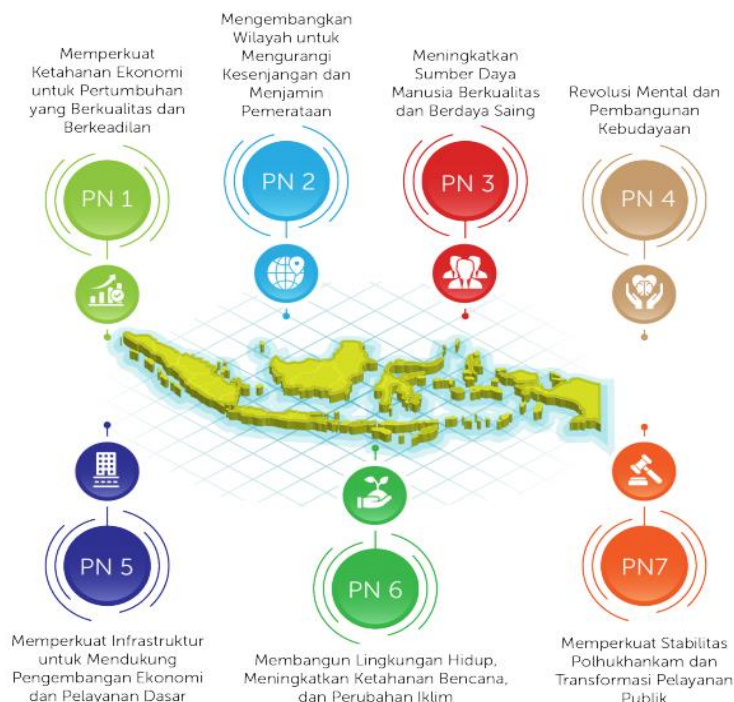
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi menjadi salah satu dari empat tahapan utama dalam proses pembangunan nasional. Adapun keempat tahapan tersebut meliputi (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional. Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, sebagai pembelajaran (*lesson learned*) bagi perbaikan kebijakan pembangunan pada tahap berikutnya. Peran strategis evaluasi dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan melakukan evaluasi kebijakan pada tahun berjalan dalam rangka untuk menentukan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan.

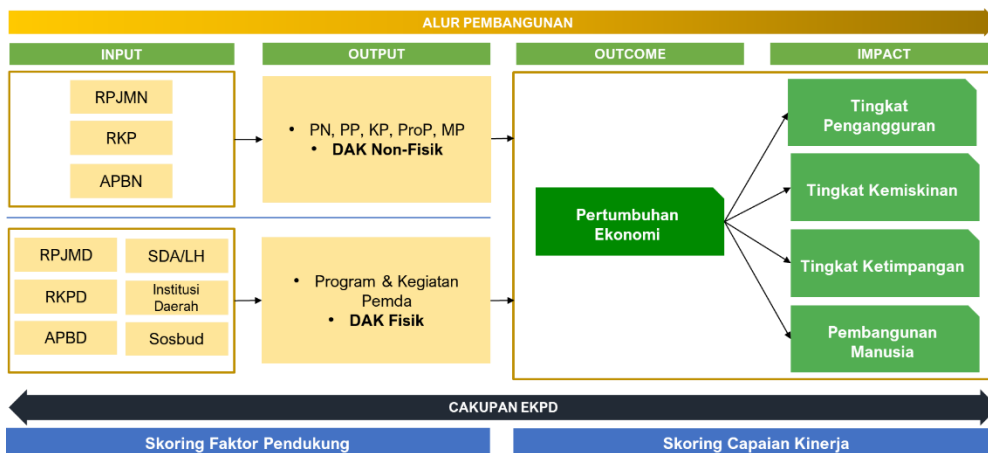
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan semestinya tidak hanya mencakup atas kebijakan dalam perencanaan pusat, namun juga kebijakan dalam perencanaan daerah yang mendukung pembangunan nasional. Adanya pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) juga menguatkan prinsip bahwa kontribusi pembangunan daerah sangat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam dokumen RKP 2023 dengan tema Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 serta Pemutakhiran RKP 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022, terdapat strategi pengembangan wilayah dan Prioritas Nasional 2 yaitu “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”. Substansi tersebut erat kaitannya dengan pembangunan daerah, dimana dalam implementasinya membutuhkan sinkronisasi intervensi pembangunan baik pusat maupun daerah untuk mencapai sasaran pembangunan kewilayahan dan sasaran Prioritas Nasional dalam RKP tersebut.

Gambar 1. 1 Prioritas RKP Tahun 2023



Gambar 1. 2 Kerangka Logis EKPD 2023



Pelaksanaan kegiatan EKPD tahun 2023 di 34 Provinsi ini fokus pada: (1) skoring pencapaian kinerja daerah; (2) identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran pembangunan; dan (3) identifikasi isu strategis daerah. Pada tahun 2023, kami sedang mengembangkan skoring kinerja daerah. Skoring ini akan fokus pada aspek

pencapaian daerah berdasarkan capaian indikator makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan, dan indeks pembangunan manusia. Selain itu, sebagai pisau analisis skoring, faktor pendukung yang dikembangkan yaitu modalitas daerah dan kerangka pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif kondisi di daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tindak lanjut dalam perencanaan di periode berikutnya.

1.2. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan EKPDP 34 Provinsi tahun 2023 yaitu untuk:

1. Melakukan skoring pencapaian kinerja daerah di 34 provinsi;
2. Identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran;
3. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

1.3. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan (*output*) dari pelaksanaan EKPDP 34 Provinsi adalah tersusunnya laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang diperkuat dengan analisis mendalam dan identifikasi permasalahan pembangunan daerah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup EKPDP dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 1.3 Ruang Lingkup Evaluasi



Ruang lingkup substansi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 34 provinsi menekankan pada skoring capaian kinerja daerah, identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran dan identifikasi isu strategis daerah. Evaluasi pencapaian ini diharapkan dapat memberikan informasi mendalam terhadap penyebab fakta *gap* yang terjadi serta identifikasi faktor yang memengaruhi hasil pencapaian tersebut secara kualitatif.

1.4. Batasan Evaluasi

Pelaksanaan EKPD 34 provinsi tahun 2023 memiliki batasan dalam evaluasi yaitu:

- 1) **Pendekatan evaluasi.** Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tidak lagi dilakukan melalui pendekatan *ex-post*, namun melalui pendekatan evaluasi *on-going*. Identifikasi pencapaian pada tahun 2023 akan lebih menggambarkan kondisi pembangunan terkini setelah masa pandemi.
- 2) **Pengumpulan data.** Pengumpulan data dan informasi lebih banyak dilakukan secara studi pustaka, dan pendalaman ke tujuh daerah terpilih. Namun demikian, dilakukan FGD kewilayahan dengan Bappeda 34 Provinsi dan *Regional Expert* di 7 wilayah.
- 3) **Cakupan evaluasi.** Cakupan evaluasi berfokus skoring pencapaian kinerja daerah, identifikasi faktor pendukung/penghambat pencapaian sasaran dan identifikasi isu strategis daerah.
- 4) **Ketersediaan data.** Tantangan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu ketersediaan data pada triwulan III dan rilis data di akhir tahun.

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”



Kementerian PPN/
Bappenas

EPD
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



BAB II

METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

BAB II

METODE EVALUASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN

2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengukuran capaian kinerja pembangunan daerah di masing-masing Provinsi dengan kombinasi metode analisis gap dan skoring komposit. Secara umum, analisis gap dilakukan dengan membandingkan antara capaian *on going* 5 (lima) indikator makro di suatu provinsi dengan sejumlah angka target. Dalam EKPD tahun 2023 ini, angka target yang menjadi pembanding adalah target RKP 2023, target RKPD 2023, angka realisasi tahun 2022, dan angka rata-rata wilayah. Angka rata-rata wilayah dihitung dengan basis 5 wilayah: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua-Nusa Tenggara. Lima indikator makro yang akan dibandingkan adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (TK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), rasio gini (RG), dan indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil perbandingan antara capaian dengan target untuk masing-masing indikator tersebut diberikan skor 1-3 berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, total skor untuk capaian kinerja suatu Provinsi secara keseluruhan dihitung dengan melakukan agregasi skor di tiap indikator dengan pertimbangan bobot tertentu. Metodologi penghitungan skor dijelaskan lebih detail pada subbab dibawah ini.

Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian/Lembaga, maupun data dari masing-masing pemerintah daerah terpilih. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan kombinasi analisis data sekunder, literature review terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta data primer dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilakukan dengan beberapa stakeholder terkait.

Tabel 2.1 Data yang digunakan dalam analisis

Metode	Data	Sumber
Skoring Capaian Kinerja	Laju Pertumbuhan Ekonomi	BPS dan Dokumen Perencanaan
	Tingkat Kemiskinan	BPS dan K/L Terkait
	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS dan Dokumen Perencanaan
	Rasio Gini	BPS dan Dokumen Perencanaan
	Indeks Pembangunan Manusia	BPS dan Dokumen Perencanaan
Skoring Faktor Pendukung	Kondisi Mantap Jalan	PUPR
	Jarak ibukota provinsi ke 5 pelabuhan utama terdekat	BIG

Metode	Data	Sumber
	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BNPB
	Proporsi PDRB Sektor Primer	BPS
	Proporsi PDRB sektor industri pengolahan	BPS
	Realisasi Penanaman Modal (PMA & PMDN)	BKPM
	Pertumbuhan PMA & PMDN	BKPM
	Ketahanan Sosial Budaya (Indeks Pembangunan Kebudayaan/ IPK)	Kemdikbud
	Subdimensi Indeks Kepuasan Hidup Sosial (Indeks Kebahagiaan)	BPS
	Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Bappenas
	Tingkat Kejahatan	BPS
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	BPS
	Indeks Kerukunan Umat Beragama/ IKUB	Kemenag
	Proporsi penduduk usia kerja	Susenas
	Proporsi penduduk lulusan perguruan tinggi	Susenas
	Produktivitas tenaga kerja	BPS
	Persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian	Sakernas
	Kinerja Anggaran	Kemenkeu
	Rasio PAD terhadap PDRB	Kemenkeu
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah/ RKFD	Kemenkeu
	Nilai AKIP Rating	KemenpanRB
	Indeks Pelayanan Publik	KemenpanRB
	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Ombudsman RI
	Kapasitas Inovasi (Indeks Daya Saing Daerah/ IDSD)	BRIN

Sumber: Penulis

2.2. Metode Analisis

Kegiatan EKPD tahun 2023 diarahkan untuk memenuhi tiga tujuan spesifik, yaitu: (1) menghitung skor pencapaian kinerja di tiap-tiap daerah, (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan kewilayahan, dan (3)

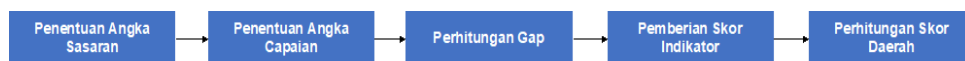
mengidentifikasi isu strategis di 34 provinsi. Secara umum, kegiatan EKPD tahun 2023 menggunakan *mixed method* dengan sejumlah metode evaluasi dan analisis antara lain: analisis gap, skoring komposit, dan analisis deskriptif. Berikut adalah uraian mengenai metode analisis EKPD 34 provinsi.

2.2.1. Skoring Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kombinasi metode analisis gap dan skoring komposit. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima indikator makro yang merupakan indikator kewilayahan dalam RKP dan RKPD. Lima indikator tersebut adalah:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
2. Tingkat Kemiskinan (TK)
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4. Rasio Gini (Gini)
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Metode analisis gap dan skoring komposit terhadap lima indikator makro tersebut akan menghasilkan skor akhir yang menggambarkan capaian kinerja *ongoing* suatu provinsi. Gambar di bawah ini menunjukkan alur penghitungan skoring capaian kinerja dalam EKPD 2023.



Gambar 0.1. Mekanisme Skoring Kinerja Capaian Pembangunan

Sumber: Penulis

Skoring capaian kinerja pembangunan dalam EKPD 2023 terdiri atas lima langkah:

1. Menentukan angka sasaran yang dijadikan sebagai pembanding dengan angka capaian. Setiap indikator memiliki empat angka sasaran, yaitu target RKP 2023, RKPD 2023, realisasi di tahun 2022, dan rata-rata wilayah di tahun 2023.
2. Menentukan kriteria skor untuk tiap perbandingan antara realisasi capaian dengan target. Dalam EKPD 2023 ini, skoring atas perbandingan dengan angka target RKP 2023 dan RKPD 2023 mengacu pada kriteria yang digunakan dalam Evaluasi RKP. Sementara itu, skoring atas perbandingan dengan realisasi capaian tahun 2022 dan rata-rata wilayah 2023 menggunakan distribusi data masing-masing indikator.
3. Menentukan angka realisasi capaian *ongoing* tiap-tiap indikator makro di 34 provinsi untuk tahun 2023.
4. Membandingkan angka realisasi capaian tiap-tiap indikator dengan empat angka sasaran (analisis gap) sehingga diperoleh angka tingkat ketercapaian dalam persentase.

- Menentukan skor indikator untuk tiap-tiap perbandingan antara capaian dan sasaran atas kelima indikator makro tersebut. Tiap-tiap nilai perbandingan akan mendapatkan skor 1-3 sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Dalam EKPD 2023, terdapat 4 (empat) angka pembanding, yaitu:

- Angka sasaran indikator pembangunan kewilayahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam dokumen RKP 2023. Angka sasaran ini hanya berlaku untuk indikator LPE, TK, dan TPT karena Pemerintah Pusat tidak menetapkan sasaran untuk Gini dan IPM hingga level provinsi.
- Angka sasaran indikator pembangunan kewilayahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam dokumen RKPD 2023. Angka sasaran ini berlaku untuk kelima indikator makro.
- Angka realisasi tahun 2022 untuk kelima indikator makro. Perbandingan antara capaian kinerja *ongoing* dengan realisasi periode lalu digunakan untuk mengukur tren atau perkembangan upaya pencapaian target dari tahun ke tahun.
- Rata-rata capaian wilayah pada tahun 2023 untuk kelima indikator makro. Perbandingan antara capaian kinerja *ongoing* dengan rerata capaian provinsi-provinsi di wilayah yang sama digunakan untuk membandingkan kinerja suatu daerah relatif terhadap capaian daerah-daerah lain di wilayah sekitarnya.

Dari kelima indikator makro yang digunakan, indikator LPE dan IPM merupakan indikator dengan arah positif—semakin tinggi nilai berarti semakin baik—sedangkan indikator TK, TPT, dan RG merupakan indikator dengan arah negatif—semakin kecil angka berarti semakin baik—sehingga diperlukan penyesuaian formula untuk menghitung capaian antara realisasi dengan target. Untuk tiap-tiap provinsi i dan kombinasi indikator-sasaran j , nilai capaian perbandingan antara realisasi dengan target RKP dan RKPD dihitung dengan formula sebagai berikut:¹

Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)	: $Capaian_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Target_{ij} - Realisasi_{ij})]}{Target_{ij}}$
Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	: $Capaian_{ij} = \frac{[Target_{ij} - (Realisasi_{ij} - Target_{ij})]}{Target_{ij}}$

¹ Secara total terdapat 18 kombinasi antara indikator dan sasaran.

Sementara itu, untuk menghitung nilai capaian perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan 2022, digunakan formula sebagai berikut:

Indikator dengan arah positif (LPE dan IPM)	: $Capaian_{ij} = \frac{Realisasi_{2022_{ij}} - Realisasi_{2021_{ij}}}{Realisasi_{2021_{ij}}}$
Indikator dengan arah negatif (TK, TPT, dan RG)	: $Capaian_{ij} = -1 * \frac{Realisasi_{2022_{ij}} - Realisasi_{2021_{ij}}}{Realisasi_{2021_{ij}}}$

Selanjutnya, dilakukan skoring indikator untuk tiap-tiap perbandingan antara realisasi dengan sasaran atas kelima indikator makro tersebut. Tiap-tiap nilai perbandingan akan mendapatkan skor 1-3 sesuai dengan kriteria yang berlaku. Untuk nilai perbandingan antara realisasi dengan target RKP dan RKPD, kriteria skoring yang digunakan mengacu pada Laporan Evaluasi RKP yang dilakukan oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor (Dit. PEPPS), Bappenas. Sementara itu, untuk perbandingan dengan realisasi tahun 2022 dan rata-rata wilayah tahun 2023, penentuan skor dilakukan berdasarkan distribusi data dari masing-masing perbandingan. Secara detail kriteria skoring yang dipakai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. Kriteria Skoring Capaian Kinerja EKPDP 2023

Angka Pembeding	Kriteria Skor Indikator		
	1 (Merah)	2 (Kuning)	3 (Hijau)
Target RKP 2023	30%	Capaian <60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan < 90% dari Target
Target RKPD 2023	40%	Capaian < 60% dari Target	Capaian antara ≥ 60% dan < 90% dari Target

Angka Pembanding	Kriteria Skor Indikator		
	1 (Merah)	2 (Kuning)	3 (Hijau)
Realisasi Tahun 2022	20%	Capaian < 0	$0 \leq \text{Capaian} < 0.5 \times \text{Positif Range}$
Rata-rata Wilayah Tahun 2023	10%	Capaian < $(\text{min} + (\text{range}/3))$	$(\text{min} + (\text{range}/3)) \leq \text{Capaian} < (\text{max} - (\text{range}/3))$

Sumber: Kriteria Skoring Evaluasi RKP 2023 (Target RKP 2023 dan RKPD 2023).

Langkah terakhir dalam skoring capaian kinerja makro adalah melakukan agregasi terhadap skor perbandingan indikator. Agregasi dilakukan dalam dua tahap. Di tahap pertama, agregasi dilakukan di tingkat indikator dengan menjumlahkan hasil perbandingan di masing-masing angka pembanding sehingga diperoleh skor RKP, RKPD, Realisasi 2022, dan Rata-Rata Wilayah. Di tahap kedua, agregasi dilakukan di tingkat angka pembanding dengan mengalikan skor-skor di atas dengan bobot masing-masing, kemudian menjumlahkan hasilnya. Bobot diperoleh dari hasil audiensi dengan akademisi dan Bappenas dengan metode AHP. Hasil agregasi di tingkat angka pembanding akan menghasilkan skor capaian kinerja untuk tiap-tiap provinsi.

2.2.2. Skoring Faktor Pendukung

Untuk memfasilitasi analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah, 24 indikator yang telah diidentifikasi tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) dimensi: (1) Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi, (2) Dimensi Sosio-Demografis, dan (3) Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola. Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi terdiri atas 2 aspek yang dibentuk dari 7 indikator. Dimensi Sosio-Demografis terbentuk atas 2 aspek yang terdiri dari 10 indikator. Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola terbentuk atas 2 aspek yang terdiri dari 7 Indikator. Pemilihan indikator didasarkan pada ketersediaan data secara berkelanjutan dalam beberapa periode waktu dan mempertimbangkan dukungan literatur. Gambar di bawah ini memberikan informasi mengenai pilar dan aspek yang digunakan dalam EKPD 2023 untuk masing-masing indikator faktor pendukung.

Tabel 2.3 Indikator Faktor Pendukung

Dimensi	Aspek	Indikator	Keterangan	Sumber Data	Frekuensi
Fisik dan Struktur Ekonomi	Aspek Fisik	Kondisi Mantap Jalan	Indikator ini mencerminkan kondisi kualitas keadaan jalan di daerah guna mendukung aktivitas pembangunan di daerah.	PUPR	Tahunan
		Jarak ibukota provinsi ke 5 pelabuhan utama terdekat	Indikator ini mencerminkan konektivitas antar daerah guna mendukung pembangunan daerah.	BIG	Setiap Saat
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indikator ini mencerminkan kerentanan suatu provinsi terhadap risiko bencana di wilayahnya.	BNPB	Tahunan
	Aspek Struktur Ekonomi	Proporsi PDRB Sektor Primer	Indikator ini mencerminkan peran sektor yang berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian provinsi.	BPS	Tahunan
		Proporsi PDRB sektor industri pengolahan	Indikator ini mencerminkan peran sektor industri manufaktur dalam perekonomian suatu daerah.	BPS	Tahunan
		Realisasi Penanaman Modal (PMA & PMDN)	Indikator ini mencerminkan peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu provinsi.	BKPM	Tahunan
		Pertumbuhan PMA & PMDN	Indikator ini mencerminkan dinamika peran sektor swasta dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu provinsi dari tahun ke tahun.	BKPM	Tahunan
	Aspek Sosial Budaya	Ketahanan Sosial Budaya (Indeks Pembangunan Kebudayaan/ IPK)	Indikator ini mencerminkan kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.	Kemdikbud	Tahunan
Sosio-Demografi		Subdimensi Indeks Kepuasan Hidup	Indikator ini digunakan proksi untuk mengukur kepuasan	BPS	Tahunan

Dimensi	Aspek	Indikator	Keterangan	Sumber Data	Frekuensi
		Sosial (Indeks Kebahagiaan)	hidup dan hubungan sosial masyarakat suatu daerah.		
		Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	Indikator ini digunakan untuk mengukur partisipasi SDM dalam suatu daerah, terutama pemuda dalam menunjang pembangunan.	Bappenas	Tahunan
		Tingkat Kejahatan	Indikator ini mencerminkan tingkat keamanan di daerah. Semakin aman suatu daerah, semakin kondusif untuk perkembangan aktivitas ekonomi.	BPS	Tahunan
		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah.	BPS	Tahunan
		Indeks Kerukunan Umat Beragama/ IKUB	Indikator ini mencerminkan tingkat kerukunan umat beragama.	Kemenag	Tahunan
	Aspek Demografi	Proporsi penduduk usia kerja	Indikator ini potensi tenaga kerja dengan populasi penduduk usia kerja yang mencerminkan potensi sumber daya manusia untuk membangun daerahnya.	Susenas	Tahunan
		Proporsi penduduk lulusan perguruan tinggi	Indikator ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia di daerah.	Susenas	Tahunan
		Produktivitas tenaga Kerja	Indikator ini Produktivitas tenaga kerja mencerminkan kemampuan tenaga kerja daerah untuk memproduksi output perekonomian.	BPS,	Tahunan
		Persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian	Indikator ini menggambarkan kondisi sumber daya manusia dalam sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama Indonesia.	Sakernas	Tahunan
Tata Kelola dan Pendanaan	Aspek Fiskal	Rasio belanja terhadap APBD	Indikator ini mencerminkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan APBD dengan baik.	Kemenkeu	Tahunan

Dimensi	Aspek	Indikator	Keterangan	Sumber Data	Frekuensi
		Rasio PAD terhadap PDRB	Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan mereka sendiri.	Kemenkeu	Tahunan
		Rasio Kapasitas Fiskal Daerah/ RKFD	Indikator ini mencerminkan ruang fiskal daerah untuk membiayai gaji pegawai sebagai cerminan kualitas layanan daerah (<i>service delivery</i>).	Kemenkeu	Tahunan
	Aspek Institusi	Nilai AKIP Rating	Indikator ini mencerminkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Instansi Pemerintah	KemenpanRB	Tahunan
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L dan Pemda	KemenpanRB	Tahunan
		Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Indikator ini mengukur kualitas pelayanan publik di suatu wilayah.	Ombudsman RI	Tahunan
		Kapasitas Inovasi (Indeks Daya Saing Daerah/ IDSD)	Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam iptek dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah.	BRIN	Tahunan

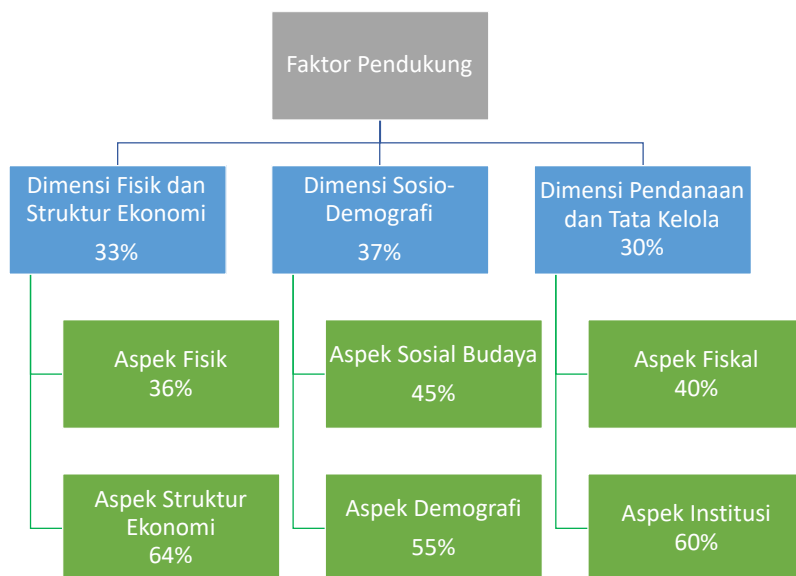
Tabel di bawah menunjukkan pengelompokan skoring berdasarkan tingkatannya. Skoring faktor pendukung berkisar antara 0-1. Gradasi warna digunakan untuk membantu visualisasi dan dilakukan dengan membagi skoring ke dalam 5 bagian sama besar. Skor 0 (warna merah) mengindikasikan capaian faktor pendukung yang paling buruk, sedangkan angka 1 (warna hijau tua) mengindikasikan capaian faktor pendukung yang paling baik.

Tabel 2.4 Pengelompokan Skoring Faktor Pendukung

Warna	Skor Batas Bawah	Skor Batas Atas	Kategori
Hijau Tua	0,81	1,00	Sangat Baik
Hijau Muda	0,61	0,80	Baik
Kuning	0,41	0,60	Cukup
Oranye	0,21	0,40	Kurang
Merah	0,00	0,20	Sangat Kurang

Sumber: Hasil penghitungan penulis

Gambar di bawah memberikan informasi mengenai bobot yang digunakan dalam penghitungan skor Faktor Pendukung. Bobot diperoleh berdasarkan opini ahli yang diolah dengan metode *analytical hierarchy process* (AHP). Pada tingkat dimensi, bobot tertinggi diperoleh Dimensi Sosio-Demografi, disusul Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi, dan Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola. Urutan bobot ini menegaskan peran modal manusia sebagai faktor kunci dalam pendukung pembangunan daerah.



Gambar 2.2. Bobot Skoring Faktor Pendukung

Sumber: Hasil penghitungan penulis dengan metode AHP terhadap sejumlah ahli

2.3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan EKPD tahun 2023 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat dan daerah seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan akademisi. Diagram di bawah memperlihatkan tahapan pelaksanaan EKPD tahun 2023.



Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”



Kementerian PPN/
Bappenas

EPD

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



BAB III

HASIL EVALUASI

BAB III HASIL EVALUASI

3. 1. Hasil Skoring Kinerja Capaian Daerah

Analisis skoring kinerja capaian pembangunan daerah dalam EKPD 2023 dilakukan dengan membandingkan capaian pada tahun 2023 dengan empat indikator pembanding yaitu: 1) perbandingan terhadap target RKP 2023; 2) perbandingan terhadap target RKPD 2023; 3) perbandingan terhadap angka realisasi tahun 2022; serta 4) perbandingan dengan capaian rata-rata di wilayah setara. Terdapat tiga target pada RKP Kewilayahan RKP tahun 2023 yaitu pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (TK), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Sementara pada target RKPD, terdapat lima indikator yang dibandingkan yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini (RG), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel dibawah ini menunjukkan hasil skoring kinerja capaian Provinsi Aceh tahun 2023.

Tabel 3.1 Skoring Kinerja Capaian Tahun 2023

Indikator Pembanding	Indikator				
	LPE (%)	TK (%)	TPT (%)	RG	IPM
Capaian 2023	4.23	14.45	6.03	0.296	74.70
I. Sasaran RKP					
1.1 Target	4.25	13.86	5.54		
1.2 Capaian Kinerja	99.5%	95.7%	91.2%		
1.3 Skor	3	3	3		
II. Sasaran RKPD					
2.1 Target	5.60	15.03	5.48	0.307	72.58
2.2 Capaian Kinerja	75.5%	103.9%	90.0%	103.6%	102.9%
2.3 Skor	2	3	2	3	3
III. Realisasi 2022					
3.1 Capaian 2022	4.21	14.75	6.17	0.291	74.11
3.2 Rasio 2023/2022	100.5%	102.1%	102.3%	98.3%	100.8%
3.3 Skor	2	2	2	1	3
IV. Wilayah Setara					
4.1 Rerata Wilayah	4.62	9.00	4.97	0.31	74.73
4.2 Capaian Kinerja	91.6%	39.4%	78.8%	105.5%	100.0%
4.3 Skor	1	1	1	2	2

Sumber: Hasil EKPD 2023

Berdasarkan hasil capaian kinerja Provinsi Aceh pada tahun 2023, hasil skoring menunjukkan perbandingan capaian kinerja 3 (tiga) indikator utama pembangunan yakni laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan (TK), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap target RKP 2023 Provinsi Aceh mendapatkan skor 3 (hijau) atau berkategori optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Jika dilihat lebih detail, capaian realiasi kinerja untuk indikator LPE, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka seluruhnya sudah diatas 90 persen atau hampir mencapai target dalam RKP 2023. Adapun capaian kinerja *ongoing* LPE dibandingkan dengan target RKP 2023 menjadi indikator dengan kinerja tertinggi yaitu mencapai 99,5 persen.

Sementara merujuk pada perbandingan antara capaian indikator makro Provinsi Aceh terhadap target RKPD tahun 2023 hanya indikator LPE dan TPT yang belum mampu mencapai target atau hanya memiliki capaian realiasi kinerja di bawah atau sebesar 90 persen. Capaian kinerja tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja untuk 3 (tiga) indikator lainnya yakni tingkat kemiskinan, rasio gini, dan IPM yang memiliki capaian kinerja diatas 100 persen. Sedangkan berdasarkan hasil skoring indikator LPE dan TPT juga menjadi dua indikator yang mendapatkan hasil skor 2 (kuning) atau berkategori cukup optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lainnya. Berdasarkan Tabel 3.1 diatas jika merujuk pada perbandingan antara capaian dengan target RKP dan RKPD menunjukan indikator tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tergolong menjadi indikator dengan capaian kinerja paling optimal baik dari sisi hasil skoring.

Hasil skoring capaian kinerja pada Tabel 3.1 diatas juga menunjukan perbandingan kinerja indikator pembangunan Provinsi Aceh tahun 2023 dengan realisasi kinerja pada tahun 2022. Indikator LPE, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM menunjukan tren kinerja yang positif sepanjang tahun 2022 hingga 2023, sedangkan hanya indikator rasio gini yang menunjukan penurunan kinerja. Capaian kinerja rasio gini Provinsi Aceh pada tahun 2023 sebesar 0,296 atau naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,291. Penurunan kinerja rasio gini membuat hasil skor pada indikator tersebut menjadi yang terendah atau tergolong kurang optimal. Di sisi lain, berdasarkan hasil skor terkait capaian tahun 2023 dengan angka realisasi tahun 2022 untuk Provinsi Aceh, IPM menjadi indikator dengan skor 3 atau indikator dengan nilai paling optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain.

Beberapa indikator makro di Provinsi Aceh telah menunjukan tren kinerja yang positif jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kendati menunjukan kinerja yang cukup baik namun jika dibandingkan dengan capaian kelompok daerah yang setara atau wilayah setara, kinerja seluruh indikator makro di Provinsi Aceh tergolong belum optimal. Ini terlihat dari capaian tiga indikator makro Provinsi Aceh yang masih jauh di bawah dari capaian wilayah setara. Capaian LPE, tingkat kemiskinan dan TPT Provinsi Aceh menunjukan skor 1 (merah) atau tergolong kurang optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja kelompok daerah yang setara.

Ketercapaian Indikator Makro

Beberapa indikator makro di Provinsi Aceh telah menunjukkan tren kinerja yang positif jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kendati menunjukkan kinerja yang cukup baik namun jika dibandingkan dengan capaian kelompok daerah yang setara atau wilayah setara, kinerja indikator makro di Provinsi Aceh tergolong belum optimal. Ini terlihat dari capaian berbagai indikator makro Provinsi Aceh yang masih dibawah dari capaian wilayah setara. Capaian LPE, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Aceh menunjukkan skor 1 atau tergolong kurang optimal jika dibandingkan dengan capaian kinerja kelompok daerah yang setara. Rata-rata capaian di wilayah setara untuk indikator tingkat kemiskinan sudah memiliki capaian *single digit* atau sebesar 9 persen, sedangkan untuk indikator tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar 4,97 persen.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,23 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 menunjukkan angka kenaikan sebesar 0,02 poin persentase dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Jika dibandingkan antara capaian dan targetnya baik target RKP maupun RKPD, berdasarkan hasil scoring; indikator LPE mendapatkan skor yang bervariasi. Skor tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2023 telah tergolong tumbuh optimal dengan hampir mencapai target RKP 2023, namun belum mampu tumbuh melebihi target RKPD 2023.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh sepanjang tahun 2023 khususnya pada periode triwulan I-2023 hingga triwulan IV-2023 menunjukkan tren yang terus menurun. Pada triwulan I-2023 ekonomi Aceh mampu tumbuh sebesar 4,63 persen, sedangkan pada triwulan IV-2023 ekonomi Aceh tumbuh sebesar 4,23 persen. Sedangkan pada periode triwulan IV-2023 kinerja ekonomi nasional juga menunjukkan capaian yang lebih baik dengan tumbuh sebesar 4,96 persen. Kendati mengalami penurunan kinerja pertumbuhan kumulatif sepanjang tahun 2023, namun pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan IV-2023 tercatat mampu tumbuh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,21 persen.

Kinerja positif pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh tahun 2023 terutama hingga periode triwulan IV-2023 (*c-to-c*) ditopang oleh beberapa lapangan usaha (LU) diantaranya LU Perdagangan dan Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor yang tumbuh kumulatif sebesar 9,05 persen, diikuti Penyedia Akomodasi dan Makanan Minuman, serta LU Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,48 persen. Namun demikian, masih terdapat beberapa lapangan usaha yang masih mengalami kontraksi diantaranya adalah LU Jasa Keuangan yang berkontraksi sebesar 10,92 persen, LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,83 persen dan Industri Pengolahan sebesar 1,65 persen. Pertumbuhan yang rendah pada LU Pertambangan dan Penggalian disebabkan oleh tingkat aktivitas pertambangan yang masih rendah, khususnya dalam sektor minyak dan gas (migas) di Provinsi Aceh.

Kinerja negatif beberapa lapangan usaha tersebut perlu menjadi perhatian mengingat LU seperti Penggalian dan Pertambangan masih memiliki kontribusi PDRB yang cukup tinggi

yaitu sebesar 7,5 persen. Di sisi lain, kontribusi PDRB di Provinsi Aceh masih didominasi oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 30,71 persen. Dua sektor tersebut menunjukkan bahwa sektor primer masih menjadi penggerak utama dalam perekonomian Aceh. Sedangkan *share* lapangan usaha terbesar lainnya diantaranya adalah LU Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 15,16 persen, LU Konstruksi sebesar 8,95 persen, dan Administrasi Pemerintahan sebesar 8,75 persen. Adapun kelima lapangan usaha tersebut memiliki peranan yang cukup besar dalam struktur perekonomian Aceh yaitu berkontribusi hingga mencapai 71,07 persen.

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki dominasi *share* sektoral tertinggi dalam struktur ekonomi Aceh pada triwulan IV-2023 tumbuh sebesar 6,72 persen. Kinerja LU pertanian tidak terlepas dari capaian produksi padi di Provinsi Aceh. Sepanjang Januari hingga September 2023 diperkirakan produksi padi di Provinsi Aceh hanya sebesar 1,05 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau menurun sebesar 4,9 ribu ton GKG dibandingkan capaian periode yang sama tahun 2022. Sementara itu, tiga kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan total produksi padi tertinggi adalah Kab. Aceh Utara, Kab. Pidie, dan Kab. Aceh Besar.

Meningkatnya kinerja dan *share* dari LU Konstruksi di Provinsi Aceh juga didorong oleh adanya beberapa proyek strategis pemerintah yang sedang berjalan. Beberapa Proyek Strategis Nasional yang sedang dibangun di Provinsi Aceh diantaranya adalah kelanjutan pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Sigli-Banda Aceh (Sibanceh) sepanjang 74,2 km, proyek Bendungan Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, pembangunan jaringan irigasi di DI Lhok Guci (Kab. Aceh Barat) dan DI Jambo Aye (Kab. Aceh Utara), serta pembangunan beberapa proyek fasilitas pendukung kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 nanti.

Sementara, jika dilihat dari sisi pengeluaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh pada tahun 2023 masih ditopang dari kinerja ekspor barang dan jasa sebesar 12,21 persen. Pertumbuhan positif juga terjadi pada seluruh komponen pengeluaran lainnya seperti komponen konsumsi LNPR yang tumbuh sebesar 8,21 persen, dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang sebesar 5,88 persen. Komponen konsumsi rumah tangga yang memiliki *share* terbesar dari sisi pengeluaran dalam struktur ekonomi Aceh hanya mampu tumbuh sebesar 4,08 persen.

Strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh adalah dengan mendorong berbagai kebijakan pembangunan diantaranya adalah berfokus pada upaya pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Berikut merupakan beberapa lokasi pengembangan kawasan berbasis potensi daerah yang berusaha didorong oleh Pemerintah Provinsi Aceh; Kawasan Basajan (Banda Aceh, Sabang, dan Jantho) yang difokuskan dalam pengembangan sektor pariwisata, SDM serta infrastruktur, kawasan Barsela (Barat Selatan Aceh) yang dikembangkan untuk kawasan agroindustri, kawasan DTGA (Dataran Tinggi Gayo Alas)

sebagai kawasan *agro-ecology*, dan kawasan Tatimlaga (Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues yang dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, perikanan, pelabuhan, dan industri makanan halal.

Sementara Selama satu tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh terus menunjukkan tren yang menurun. Tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada periode Maret 2023 tercatat sebesar 14,45 persen atau turun dari tahun 2022 yang sebesar 14,64 persen. Hasil skoring pada Tabel 3.1 diatas untuk indikator tingkat kemiskinan Provinsi Aceh berdasarkan perbandingan antara capaian tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022 mendapatkan skor 2 (kuning). Adapun tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2023 masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Pada periode Maret 2023 tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 16,92 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,14 poin persentase dibandingkan Maret 2022. Sedangkan di wilayah perkotaan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 sebesar 9,79 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 10,35 persen. Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh secara umum tidak terlepas dari kondisi perekonomian Aceh yang semakin membaik khususnya pasca pandemi Covid-19. Perkembangan ekonomi Provinsi Aceh terefleksi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dari berbagai lapangan usaha terutama untuk lapangan usaha dominan atau unggulan daerah seperti LU pertanian. Hal ini secara tidak langsung memberikan implikasi positif pada angka penurunan kemiskinan daerah.

Berdasarkan kewilayahan, capaian tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada Maret 2023 masih menjadi daerah di wilayah Sumatera yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di atas Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Capaian yang kurang optimal dari sisi kewilayahan ini juga tercermin pada hasil skor perbandingan terhadap wilayah setara yang memiliki skor 1 (merah). Selain itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama lima tahun terakhir juga jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-6 dari 34 provinsi pada tahun 2023. Kendati demikian, penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh sejak tahun 2019 merupakan yang tertinggi ke-4 di wilayah Sumatera setelah Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan.

Sejalan dengan indikator tingkat kemiskinan pada periode Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 806,75 ribu orang atau turun dibandingkan dengan penduduk miskin pada periode September 2022 yang berjumlah 818,47 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan pada Maret 2023 sebanyak 617,56 ribu orang, sedangkan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan pada periode yang sama sebanyak 189,16 ribu orang. Baik di wilayah perdesaan dan perkotaan jumlah penduduk miskin menunjukkan penurunan. Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh pada Maret 2023 mengalami kenaikan menjadi Rp672.534,- atau naik dibandingkan periode September 2022 yang sebesar Rp617.293,-. Kenaikan garis kemiskinan di Provinsi Aceh sangat dipengaruhi oleh komoditi makanan seperti beras dan rokok kretek filter yang menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh yaitu biaya perumahan, bensin, dan

komoditi listrik. Adapun perubahan Garis Kemiskinan tidak terlepas dari pengaruh inflasi di daerah dimana pada periode Maret 2023 inflasi Provinsi Aceh sebesar 5,46 persen atau jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada September 2022 yang sebesar 7,38 persen.

Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Aceh pada tahun 2022 telah mencapai 2,95 persen. Capaian tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 3,47 persen. Meski mengalami penurunan, namun tetap diperlukan kebijakan yang lebih optimal dalam rangka menurunkan angka kemiskinan ekstrim tersebut ditengah target dan upaya nasional dalam menghapus kemiskinan ekstrem di tahun 2024 hingga mencapai angka 0-1 persen. Adapun beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem diantaranya adalah dengan penyiapan intervensi khusus pada kantong-kantong atau wilayah miskin ekstrem dengan menekankan skema konvergensi dan kolaborasi. Selain itu, pemerintah juga berfokus dalam meningkatkan ketercapaian atau ketepatan program kemiskinan melalui penyiapan sistem pengelolaan data (PPKE) dan data Regsosek.

Secara umum Pemerintah Provinsi Aceh melakukan beberapa strategi atau kebijakan upaya percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem daerah melalui 6 (enam) strategi utama yang meliputi 1) mengurangi beban penduduk miskin; 2) meningkatkan pendapatan penduduk miskin; 3) menguatkan kapasitas penduduk miskin; 4) menekan biaya transaksi ekonomi; 5) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; dan 6) menanggulangi bencana.

Dari sisi tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk atau gini rasio Provinsi Aceh pada periode Maret 2023 sebesar 0,296. Capaian tersebut meningkat 0,015 poin dibandingkan dengan gini rasio pada periode September 2022 yang sebesar 0,291. Hasil skor gini rasio berdasarkan perbandingan capaian terhadap target RKPD skor 3 (hijau) atau telah melewati target. Namun demikian, untuk perbandingan antara capaian 2023 dengan realisasi 2022 gini rasio Provinsi Aceh memiliki skor 1 (merah) atau menjadi yang terendah dibandingkan dengan indikator lainnya.

Dilihat secara daerah, maka tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (gini rasio) di wilayah perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan. Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,318, sedangkan gini ratio di daerah perdesaan adalah sebesar 0,265. Capaian gini rasio Aceh pada Maret 2023 masih jauh lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 0,388. Secara nasional capaian gini rasio Provinsi Aceh menjadi yang terendah ke-5 mengungguli beberapa provinsi seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Selain itu, selama satu tahun terakhir Provinsi Aceh menunjukkan penurunan gini rasio tertinggi ke-4 secara nasional atau sebesar 0,015 poin.

Dari sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Aceh pada periode Agustus 2023 adalah sebesar 6,03 persen atau mengalami penurunan dibandingkan

periode Agustus 2022 yang sebesar 6,17 persen. Berdasarkan capaian tersebut, hasil skoring TPT Provinsi Aceh jika diperbandingkan dengan realisasi tahun 2022 memiliki skor 2 (kuning). Berdasarkan daerahnya, maka TPT terbesar pada periode Agustus 2023 adalah TPT di wilayah perkotaan yang sebesar 9,18 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,86 poin persentase dibandingkan periode Agustus 2022. Sementara untuk daerah perdesaan TPT adalah sebesar 4,22 persen turun dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar 5,09 persen.

Capaian Provinsi Aceh juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan capaian nasional yang sebesar 5,32 persen. Sementara dilihat dari angka perubahannya, maka realisasi perubahan TPT Provinsi Aceh selama satu tahun terakhir yang sebesar 0,14 poin persentase tergolong kurang optimal terutama jika dibandingkan dengan perubahan TPT nasional yang menunjukkan angka yang lebih besar yaitu sebesar 0,54 poin persentase.

Penurunan TPT di Provinsi Aceh tidak terlepas dari serapan tenaga kerja di beberapa sektor. Berdasarkan data BPS (2023) jika dilihat lebih dalam berdasarkan penduduk yang bekerja selama periode Agustus 2022 hingga 2023, lapangan usaha yang mengalami peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja adalah LU perdagangan besar dan eceran yang sebesar 1,28 poin persentase, LU konstruksi sebesar 0,67 poin persentase, dan LU penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 0,64 poin persentase. Adapun lapangan usaha di Provinsi Aceh yang menyerap jumlah tenaga kerja terbesar adalah LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 38,68 persen, diikuti oleh LU perdagangan besar dan eceran sebesar 14,65 persen, dan LU konstruksi sebesar 7,3 persen. Kendati LU pertanian menjadi sektor dengan kontribusi serapan tenaga kerja terbesar namun *share* tersebut pada periode Agustus 2023 mengalami penurunan dibandingkan periode tahun 2022 yang sebesar 40,5 persen.

TPT berdasarkan pendidikan, menunjukkan bahwa TPT pada periode Agustus 2023 untuk tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi 2 kelompok yang memiliki angka pengangguran tertinggi di Provinsi Aceh. Pada periode Agustus 2023, TPT yang berasal dari SMA sebesar 9,77 persen, sedangkan untuk tamatan SMK 9,56 persen. Selain itu, untuk TPT lulusan Perguruan Tinggi, baik untuk jenjang Diploma dan Universitas tergolong tinggi. TPT yang berasal dari lulusan Diploma I/II/III pada periode yang sama sebesar 6,74 persen dan TPT dari Universitas sebesar 6,76 persen. Masih tingginya angka pengangguran untuk kelompok pendidikan menengah atas dan tinggi dapat menunjukkan beberapa masalah dalam pasar tenaga kerja daerah atau sistem pendidikan yang ada. Jika dilihat lebih dalam berdasarkan karakteristik penduduk bekerja menunjukkan bahwa sektor nonformal (61,45 persen) masih mendominasi serapan sektor ketenagakerjaan di Provinsi Aceh berbanding dengan sektor formal yang hanya sebesar 38,55 persen. Selain itu, belum optimalnya investasi untuk sektor-sektor nonprimer seperti industri pengolahan juga menyebabkan masih minimnya kesempatan kerja yang ada saat ini dan menjadi salah satu penyebab atau implikasi dari kurang terserapnya tenaga kerja untuk kelompok terdidik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh pada tahun 2023 memiliki capaian sebesar 74,7. Capaian tersebut naik sebesar 0,59 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 74,11. Merujuk pada hasil skoring, indikator IPM memiliki skor 3 atau tergolong optimal. Capaian pada tahun 2023 tersebut juga menunjukkan status pembangunan manusia di Provinsi Aceh sudah berkategori “tinggi”. Peningkatan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2023 didorong oleh peningkatan seluruh komponen pembentuk IPM yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,38; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 9,55; Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 73,06 dan Pengeluaran Per kapita sebesar sebesar Rp10.334.000,-.

Berdasarkan komponen IPM, pertumbuhan IPM Provinsi Aceh pada tahun 2023 didorong oleh semua dimensi. Kendati mengalami kenaikan, namun pada Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dan Pengeluaran Riil Perkapita (yang disesuaikan) Provinsi Aceh tahun 2023 masih berada di bawah nasional. Sementara komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Aceh tahun 2022 memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan nasional. Dilihat dari perubahannya selama 5 tahun terakhir, komponen RLS dan HLS Aceh masih memiliki tingkat perubahan kumulatif yang lebih rendah dibandingkan nasional, sebaliknya pada komponen Pengeluaran Perkapita dan UHH memiliki tingkat perubahan yang lebih besar dibandingkan nasional.

3. 2. Hasil Skoring Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) dikelompokkan melalui 3 (tiga) dimensi utama, yakni dimensi fisik dan struktur ekonomi, dimensi sosio-demografi, dan dimensi pendanaan serta tata kelola. Pertama, Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi memberikan gambaran komprehensif tentang sifat fisik dan geografis suatu wilayah, termasuk infrastruktur yang memengaruhi aktivitas ekonomi serta pencapaian pembangunan. Kedua, Dimensi Sosio-Demografi memberikan sudut pandang mengenai kondisi sosial dan demografis masyarakat, melibatkan aspek kebudayaan sebagai modal utama dalam pembangunan daerah. Ketiga, Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola memberikan wawasan terkait daya saing serta pelayanan publik dari pemerintah daerah, yang memberikan dukungan esensial untuk pembangunan daerah. Dimensi tata kelola tidak hanya mencakup manajemen pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, tetapi juga melibatkan peran sektor swasta dalam memajukan pembangunan. Dimensi ini juga mencerminkan peran institusi ekonomi di dalam daerah yang dapat memberikan dukungan penting bagi kemajuan pembangunan.

Skoring faktor pendukung bersifat relatif terhadap provinsi lainnya. Beberapa indikator faktor pendukung EKPD bukan berupa capaian, namun lebih berfungsi sebagai pendukung analisis dalam menggambarkan kondisi daerah berdasarkan karakteristiknya (potret daerah). Dengan melihat skoring faktor pendukung diharapkan dapat teridentifikasi

keterkaitan modal yang dimiliki suatu daerah dengan kinerjanya dalam mencapai indikator makro pembangunan.

Tabel 3.2 Ringkasan Skoring Faktor Pendukung

Provinsi	Skor Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi	Skor Dimensi Sosio-Demografi	Skor Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola
Aceh	0.22	0.39	0.47

Sumber: Penulis

Berdasarkan hasil skor faktor pendukung pada Tabel 3.2, terlihat bahwa Dimensi Fisik dan Struktur ekonomi Provinsi Aceh memperoleh skor sebesar 0,22 (orange). Skor ini menunjukkan bahwa kinerja Provinsi Aceh dalam pengembangan infrastruktur fisik dan sektor ekonomi masih memerlukan perhatian lebih lanjut, dan dapat dikategorikan belum optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Kedepan perlu adanya fokus yang diberikan pada berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur fisik, investasi, dan diversifikasi sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan capaian dalam dimensi ini. Identifikasi mendalam faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian dalam Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi juga perlu menjadi prioritas, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat.

Sementara pada capaian dimensi sosio demografi, Provinsi Aceh memperoleh skor 0,39 (orange). Hasil skor tersebut mengindikasikan hal yang sama dengan capaian pada Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi yang juga belum cukup optimal. Analisis yang lebih mendalam pada aspek-aspek sosial masyarakat, demokrasi, dan ketenagakerjaan menjadi kunci untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pada Dimensi Sosio-Demografi. Perluasan program atau solusi yang bertujuan meningkatkan indikator-indikator sosio-demografi terus perlu ditingkatkan, sehingga dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Sebaliknya, Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola di Provinsi Aceh menunjukkan pencapaian yang relatif optimal dengan skor 0,47 (kuning). Meskipun skor pada dimensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan dua dimensi sebelumnya, namun tetap diperlukan perhatian dan langkah-langkah progresif untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan dalam tata kelola, terutama pada aspek pelayanan publik di Provinsi Aceh. Kendati capaian pada Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola tergolong cukup optimal, langkah-langkah strategis masih dibutuhkan guna memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Fokus pada perbaikan aspek-aspek tertentu dalam tata kelola, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, akan mendukung pencapaian hasil pembangunan yang lebih optimal di Provinsi Aceh.

Secara keseluruhan, Provinsi Aceh perlu untuk memfokuskan upaya pada aspek-aspek yang masih menunjukkan skor rendah, khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur ekonomi dan sosio-demografis. Diharapkan melalui upaya peningkatan kualitas dan cakupan infrastruktur serta struktur ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal. Sementara secara bersamaan perbaikan dalam Dimensi Sosio-Demografi akan membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam hal Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola, tetap perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih optimal. Penjelasan lebih lanjut mengenai indikator per dimensi dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

3. 3. Analisis Faktor Pendukung

a. Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi

Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi khususnya pada aspek fisik utamanya menyoroti hal-hal terkait kondisi infrastruktur wilayah. Secara umum, hasil skor pada aspek fisik sebesar 0,27 (orange) yang menandakan bahwa pencapaian fisik di Provinsi Aceh tergolong belum cukup optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Hasil skor tersebut secara lebih rinci dapat dilihat dari pencapaian 3 indikator kunci dalam pencapaian aspek fisik. Dimana ketiga indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang kondisi dan tantangan pembangunan di Provinsi Aceh. Adapun ketiga indikator tersebut, yaitu indikator mantap jalan, indikator jarak pelabuhan utama, dan indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI).

Sementara itu, selain aspek fisik penilaian juga dilakukan untuk aspek struktur ekonomi. Hasil skor untuk aspek struktur ekonomi di Provinsi Aceh adalah sebesar 0,19 (merah) atau tergolong tidak optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Capaian tersebut mengindikasikan adanya sejumlah tantangan yang perlu dicermati lebih mendalam terkait dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh. Pada aspek struktur ekonomi terdapat 4 (empat) indikator kunci yang meliputi indikator Proporsi PDRB Primer, Proporsi PDRB Sektor Manufaktur, Realisasi PMA dan PMDN, serta Pertumbuhan PMA dan PMDN.

Tabel 3.3 Skor Dimensi Fisik dan Struktur Ekonomi

Aspek	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Aspek
Fisik	Mantap Jalan	59%	0.15	0.27
	Jarak Pelabuhan Utama	2604.2	0.50	

Aspek	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Aspek
	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	149.1	0.16	
Struktur EKonomi	Proporsi PDRB Primer	34.89%	0.65	0.19
	Proporsi PDRB Sektor Manufaktur	4.43%	0.08	
	Realisasi PMA dan PMDN	6.34	0.03	
	Pertumbuhan PMA Dan PMDN	-42.14%	0.01	

Sumber: Penulis

Dalam aspek fisik, hasil skor pada indikator mantap jalan dan indikator IRBI menjadi dua indikator yang berpotensi menjadi faktor penghambat (merah) dalam proses pembangunan di Provinsi Aceh. Indikator mantap jalan memperoleh skor 0,15 dengan realiasi capaian sebesar 59 persen, capaian tersebut mencerminkan masih tergolong rendahnya kualitas jalan yang berkategori baik dan sedang di Provinsi Aceh. Sementara indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) memperoleh skor 0,16 dengan capaian sebesar 149,1. Berdasarkan skor dan capaian dari indikator tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya risiko bencana di Provinsi Aceh. Kendati masih tingginya risiko bencana di Provinsi Aceh, namun capaian IRBI pada periode tahun 2022 tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan angka risiko bencana di Provinsi Aceh jika dibandingkan dengan tahun 2021 lalu. Selanjutnya, indikator jarak pelabuhan utama yang mendapatkan skor 0,5 (kuning) dengan capaian sebesar 2604,2. Meski memiliki skor yang relatif baik, namun perlu tetap adanya optimasi dalam manajemen jarak dan konektivitas dengan pelabuhan utama. Ketiga indikator pada aspek fisik tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam upaya mendorong kontribusi positif terhadap efisiensi dan distribusi terutama pada sektor peningkatan perdagangan di Provinsi Aceh. Hal ini akan memberikan implikasi langsung terhadap pergerakan perekonomian daerah.

Selanjutnya indikator pertama pada aspek struktur ekonomi yaitu indikator proporsi PDRB primer (hijau muda). Capaian yang tinggi pada indikator ini menunjukkan bahwa sektor primer memiliki dominasi sektoral yang cukup tinggi dan masih menjadi salah satu faktor pendukung yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Aceh. Meskipun demikian, capaian *share* sebesar 34,89 persen mengindikasikan adanya ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor primer terhadap perekonomian Aceh. Upaya peningkatan nilai tambah pada sektor primer menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Aceh. Selain itu, upaya diversifikasi struktur ekonomi menjadi upaya dalam meminimalisir kerentanan (*vulnerability*) ekonomi daerah yang tinggi.

Dari tabel diatas, menunjukan, tiga dari empat indikator dalam aspek struktur ekonomi memiliki hasil skor yang rendah atau tergolong tidak optimal (merah) jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Ketiga indikator yang berpotensi menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di Provinsi Aceh, diantaranya adalah indikator proporsi PDRB terhadap sektor manufaktur yang mendapatkan skor 0,08 dengan capaian 4,43 persen. Skor tersebut menunjukan bahwa sektor manufaktur di Aceh masih tergolong tidak optimal. Kinerja sektor manufaktur yang rendah di Provinsi Aceh diindikasikan oleh beberapa hal diantaranya adalah masih minimnya hilirisasi dari sektor primer yang menjadi sektor unggulan daerah.

Selain itu, kawasan strategis khususnya terkait industri yang diharapkan menjadi medium dalam pengembangan sektor manufaktur daerah belum terbangun dan dikembangkan secara optimal. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kontribusi sektor manufaktur dalam perekonomian Aceh yang lebih besar. Ini mengingat peran penting sektor manufaktur yang tidak hanya mampu menjadi akselerator ekonomi, namun juga dapat menjadi katalis penciptaan lapangan kerja baru. Indikator kedua, yang tergolong tidak optimal adalah indikator realisasi PMA dan PMDN yang mendapatkan skor 0,03 dengan capaian 6,34. Skor rendah atau tidak optimal tersebut menggambarkan tantangan yang cukup tinggi dalam menarik investasi ke Provinsi Aceh jika dibandingkan daerah lain di Indonesia. Realisasi investasi yang rendah juga tercermin dari capaian pada indikator pertumbuhan PMA dan PMDN yang memiliki skor 0,01 dan mencatatkan capaian pertumbuhan negatif sebesar -42,14 persen. Hasil skor dan realiasi capaian pada aspek struktur ekonomi Aceh tergolong masih cukup rendah terutama dalam upaya peningkatan nilai tambah dan diversifikasi perekonomian. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah.

b. Dimensi Sosio-Demografi

Aspek Sosial-Budaya menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian skoring kinerja pembangunan daerah. Aspek sosial budaya yang mencerminkan dinamika masyarakat dan kehidupan budaya di suatu wilayah. Skor aspek sosial-budaya di Provinsi Aceh adalah sebesar 0,44 (kuning). Dengan hasil skor tersebut menunjukkan pencapaian sosial budaya di Provinsi Aceh sudah tergolong cukup optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Adapun terdapat 6 indikator pendukung pada aspek sosial budaya yang meliputi indikator Ketahanan Sosial Budaya (IPK), indikator Kepuasan Hidup Sosial, indikator Partisipasi dan Kepemimpinan, indikator Tingkat Kejahatan, indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Sementara pada aspek Demografi Provinsi Aceh memperoleh skor sebesar 0,34 atau tergolong belum cukup optimal jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Adapun aspek demografi memiliki variabel kunci seperti proporsi penduduk usia kerja, penduduk

lulusan pendidikan tinggi, produktivitas tenaga kerja, dan persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian.

Tabel 3.4 Skor Dimensi Sosio - Demografi

Aspek	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Aspek
Sosial Budaya	Ketahanan Sosial Budaya (IPK)	54.28	0.02	0,44
	Kepuasan Hidup Sosial	75.5	0.35	
	Partisipasi dan Kepemimpinan	53.33	0.91	
	Tingkat Kejahatan	125	0.60	
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	80.82	0.79	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	57.51	0.00	
Demografi	Proporsi penduduk usia kerja	47.20%	0.20	0,34
	Proporsi penduduk lulusan pendidikan tinggi	10.50%	0.36	
	Produktivitas tenaga kerja	58,850,936.58	0.09	
	Persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian	32.10%	0.70	

Sumber: Penulis

Dalam aspek sosial budaya terdapat dua indikator yang memiliki skor indikator pendukung yang rendah, yaitu indikator Ketahanan Sosial Budaya (IPK) dan indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Secara rinci berikut merupakan hasil skor dan capaian indikator pada aspek sosial budaya. Indeks Ketahanan Sosial Budaya (IPK) memiliki skor 0,02 atau dengan realisasi capaian 54,28. Hasil skor tersebut tergolong rendah dan menunjukkan bahwa masyarakat kurang bisa dalam menghadapi tantangan yang signifikan dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan sosial dan budaya mereka. Indikator kedua dalam aspek sosial budaya yang memiliki skor rendah adalah indikator IKUB yang memiliki capaian 57,51. Skor IKUB yang rendah mengisyaratkan masih ditemukan adanya tantangan

dalam mencapai atau mempertahankan kerukunan antarumat beragama. Indikator lain yang mendapatkan skor kurang cukup optimal (orange) adalah indikator Kepuasan Hidup Sosial yang memiliki skor 0,35 dengan capaian 75,5. Hasil skor mengisyaratkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat masih tergolong cukup rendah.

Sementara untuk indikator yang tergolong tinggi dalam aspek sosial budaya adalah indikator Partisipasi dan Kepemimpinan mencapai skor 0,91 dengan capaian 53,33, menandakan partisipasi yang sudah sangat optimal. Indikator lainnya, seperti indikator Tingkat Kejahatan memiliki skor 0,6 dengan capaian 125, menunjukkan kondisi yang relatif kondusif atau aman. Indikator selanjutnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang mendapatkan skor 0,79 dengan capaian sebesar 80,82. Skor tersebut menunjukan tingkat kesehatan demokrasi yang baik di Provinsi Aceh. Tingginya skor IDI dapat diindikasikan bahwa sudah adanya struktur demokratis yang kuat, partisipasi masyarakat dalam proses politik, serta pengakuan terhadap hak-hak sipil.

Indikator proporsi penduduk usia kerja dan indikator produktivitas tenaga kerja di Provinsi Aceh menjadi dua indikator dalam aspek demografi yang memiliki hasil skor terendah (merah). Indikator Proporsi Penduduk Usia Kerja yang menjadi bagian dari aspek demografi memiliki skor 0,02 dengan capaian sebesar 47,2 persen. Hasil skor pada indikator tersebut menunjukan potensi sumber daya manusia yang tergolong masih rendah di Provinsi Aceh terutama jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Sementara untuk Indikator Produktivitas Tenaga Kerja mendapatkan skor 0,09 yang merujuk pada masih rendahnya efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam menghasilkan barang dan jasa di Provinsi Aceh. Ini menunjukan tingkat penciptaan output dari jumlah input atau SDM yang ada masih tergolong rendah. Indikator proporsi penduduk lulusan pendidikan tinggi mendapatkan skor sebesar 0,36 dengan capaian sebesar 10,5 persen. Hasil skor dan capaian tersebut memperlihatkan jumlah SDM dengan kualifikasi terampil atau pendidikan tinggi yang masih terbatas. Indikator terakhir pada aspek demografi adalah indikator persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Hasil skor pada indikator tersebut dalam aspek demografi Aceh yang memiliki capaian yang tergolong cukup tinggi (hijau muda) atau sebesar 0,7. Hasil skor tersebut menunjukan cukup tingginya angka penyerapan sektor pertanian dalam struktur ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Dilihat dari realiasi capaian pada aspek demografi, menunjukan bahwa upaya peningkatan kualitas SDM di Provinsi Aceh perlu lebih optimal khususnya untuk mendorong produktivitas terutama kaitannya dalam mendorong optimalisasi tenaga kerja di sektor pertanian yang memiliki proporsi pekerja cukup besar di Provinsi Aceh.

c. Dimensi Tata Kelola dan Pendanaan

Dimensi Tata Kelola dan Pendanaan terbagi menjadi dua aspek, yakni aspek fiskal dan aspek institusi. Aspek Fiskal mencakup tiga indikator utama, yaitu rasio kinerja anggaran, rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) (*local tax ratio*), dan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah/RKFD. Indikator kinerja anggaran digunakan untuk menunjukkan sejauh mana daerah mampu merencanakan program atau kegiatan dengan efektif. Indikator *local tax ratio* mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan yang mereka miliki untuk mendanai program atau kegiatan yang telah direncanakan. Sementara itu, RKFD mencerminkan ketersediaan fiskal daerah untuk mendukung pembayaran gaji pegawai sebagai gambaran dari kualitas layanan yang diberikan oleh daerah (*service delivery*).

Aspek Institusi terdiri dari empat indikator, yaitu Nilai AKIP Rating, Indeks Pelayanan Publik, Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik, dan Kapasitas Inovasi Daerah (IDSD). Pertanggungjawaban kinerja kepada instansi pemerintah tercermin dalam penilaian AKIP Rating. Kinerja pelayanan publik di berbagai tingkatan pemerintahan dievaluasi dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang melibatkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi. Kualitas layanan publik di suatu wilayah dinilai melalui Indikator Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Sementara itu, Kapasitas Inovasi Daerah tercermin dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menilai kemampuan pemerintah daerah dalam IPTEK dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Berikut ini adalah hasil skor untuk dimensi Pendanaan dan Tata Kelola Provinsi Aceh.

Tabel 3.5 Skor Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola

Aspek	Indikator	Capaian	Skor Indikator	Skor Aspek
Fiskal	Rasio belanja terhadap APBD	94.03%	0.56	0.48
	Rasio PAD terhadap PDRB	3.84%	0.62	
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)	1.79	0.26	
Institusi	Nilai SAKIP	64.18	0.13	0.47
	Indeks Pelayanan Publik	4.01	0.61	
	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	79.10	0.80	
	Nilai Pilar Kapabilitas Inovasi (IDSD)	2.35	0.33	

Sumber: Penulis

Provinsi Aceh mendapatkan skor keseluruhan sebesar 0,48 untuk aspek fiskal. Skor ini mencerminkan kinerja keseluruhan dalam hal mengelola aspek keuangan dan anggaran daerah sudah cukup optimal. Pada aspek fiskal, indikator Rasio Belanja Terhadap APBD menunjukkan bahwa Aceh memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan dan realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan capaian sebesar 94,03 persen, Provinsi Aceh telah cukup berhasil melaksanakan kebijakan belanja sesuai dengan alokasi anggaran yang direncanakan. Lalu indikator Rasio PAD terhadap PDRB, dimana Provinsi Aceh mendapatkan skor yang relatif tinggi jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Hasil skor tersebut mencerminkan kemampuan Provinsi Aceh dalam mengoptimalkan pencarian dan pengelolaan sumber pendapatan daerah (PAD) dalam struktur perekonomiannya. Dalam upaya mengoptimalisasi peningkatan sumber daya pendapatan lokal, pemerintah provinsi perlu berupaya melakukan perluasan diversifikasi pendapatan dari potensi-potensi ekonomi daerah. Terakhir dalam aspek fiskal adalah indikator rasio kapasitas fiskal daerah yang memberikan gambaran tentang sejauh mana Aceh dapat membiayai gaji pegawai, mencerminkan kualitas layanan daerah (*service delivery*). Pada indikator berikut Provinsi Aceh memiliki skor indikator yang relatif rendah yaitu 0,13 dengan capaian sebesar 1,79. Dengan hasil ini maka perlu dipertimbangkan upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal demi peningkatan kualitas layanan publik di Provinsi Aceh.

Aspek kedua dalam Dimensi Pendanaan dan Tata Kelola adalah aspek institusi yang diukur melalui empat indikator pendukung. Pertama, nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mendapatkan skor sebesar 0,13 dengan capaian 64,18. Hasil ini mencerminkan tidak optimalnya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik di Provinsi Aceh jika dibandingkan secara relatif dengan daerah lain. Adapun indikator nilai SAKIP menjadi indikator yang memiliki hasil skor terendah dalam aspek ini. Indikator kedua, yang tergolong mendapatkan nilai skor terendah kedua adalah indikator Nilai Pilar Kapabilitas Inovasi (IDSD). indikator kapabilitas inovasi daerah (IDSD) mendapatkan skor 0,33 dengan capaian 2,35, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengembangan IPTEK dan penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Sementara indikator Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik menjadi indikator dengan nilai skor tertinggi dalam aspek institusi yaitu sebesar 0,8. Nilai kepatuhan pelayanan publik yang sangat optimal menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi.

d. Keterkaitan Skoring Kinerja Makro dan Skoring Faktor Pendukung

Berdasarkan deskripsi skoring faktor pendukung di atas, dapat terlihat bahwa ketercapaian kinerja makro Provinsi Aceh salah satunya dipengaruhi oleh indikator-indikator faktor pendukung. Beberapa faktor pendukung yang menjadi modal utama Provinsi Aceh antara lain seperti partisipasi dan kepemimpinan, standar pelayanan publik, *share* penduduk yang bekerja di sektor primer, IDI, dan proporsi PDRB sektor primer. Hal ini menandakan indikator-indikator tersebut relatif lebih optimal jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Namun beberapa indikator juga memiliki skor yang kurang optimal seperti produktivitas tenaga kerja, ketahanan bencana, serta mantap jalan, sehingga ke depannya intervensi yang diberikan dapat difokuskan pada ketiga indikator tersebut agar kinerja pembangunan Provinsi Aceh dapat lebih optimal.

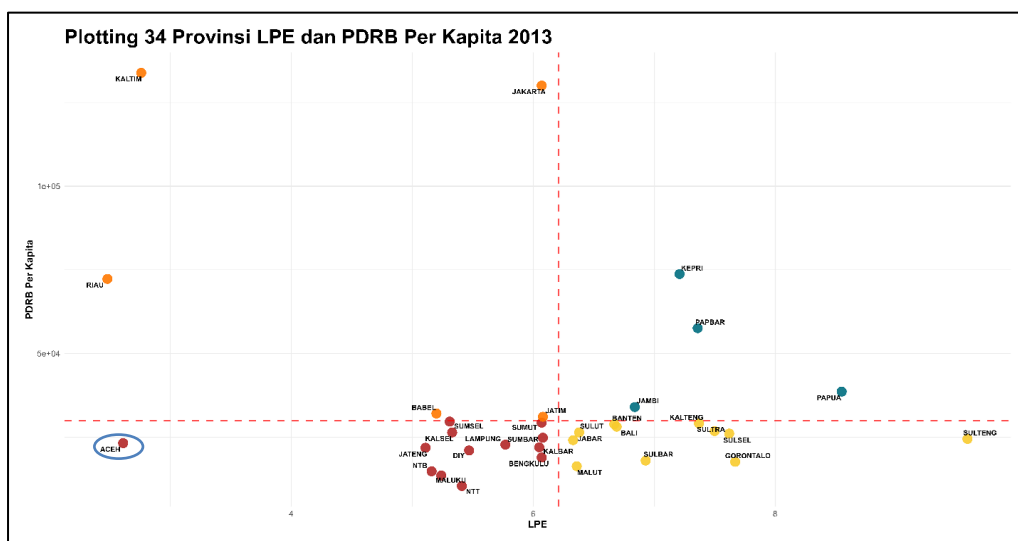
3. 4. Analisis *Time Series* Kinerja Daerah

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2023 juga tidak hanya melihat skoring kinerja pencapaian daerah, namun juga menganalisis tren perkembangan kinerja daerah selama 10 tahun terakhir terutama pada kinerja sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Perkembangan kinerja 34 provinsi didasarkan atas capaian perbandingan 4 indikator terpilih terhadap rata-rata. Adapun keempat indikator terpilih yang diperbandingkan meliputi perbandingan terhadap PDRB perkapita dan LPE, PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan, serta PDRB perkapita dan tingkat pengangguran terbuka. Keempat perbandingan tersebut digambarkan melalui partisi 4 kuadran yang bertujuan untuk memudahkan dalam melihat perkembangan dari pencapaian setiap di masing-masing indikator tersebut.

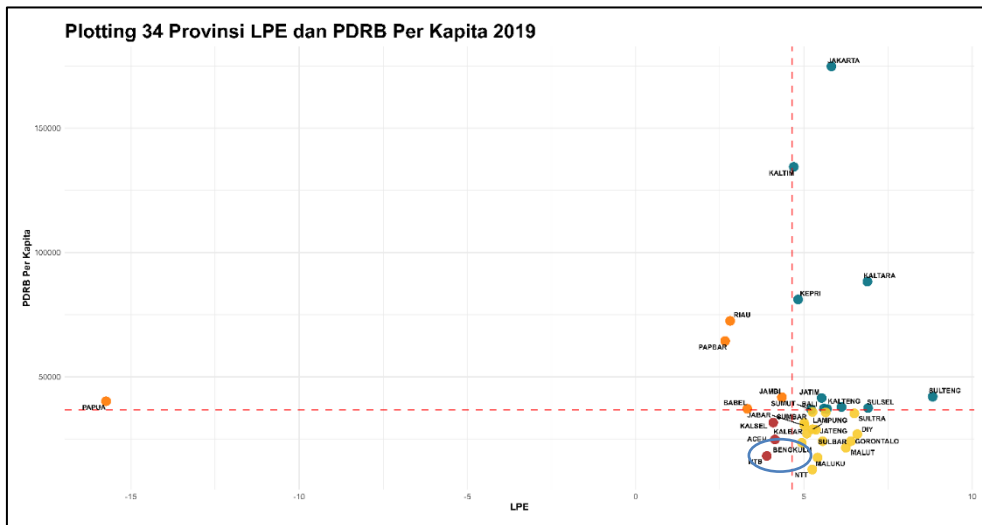
1.4.1 Perbandingan PDRB Per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perbandingan antara PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2013 hingga 2022 mayoritas daerah berada pada kuadran III dan IV. Persebaran provinsi menunjukkan kinerja PDRB per kapita yang masih rendah atau dibawah rata-rata. Selama 10 tahun terakhir, Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Timur menjadi 2 daerah yang tergolong memiliki pencapaian per kapita tertinggi. Dari sisi pencapaian LPE Provinsi Maluku Utara tergolong menjadi daerah yang mampu mempertahankan kinerjanya sebelum dan pasca pandemi Covid-19. Disamping itu, Provinsi Sulawesi Tengah, Papua, dan Kalimantan Tengah berada pada kuadran ideal yaitu kondisi PDRB perkapita yang tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adapun secara lebih detail berikut merupakan analisis perkembangan pencapaian PDRB per kapita dan LPE di Provinsi Aceh.

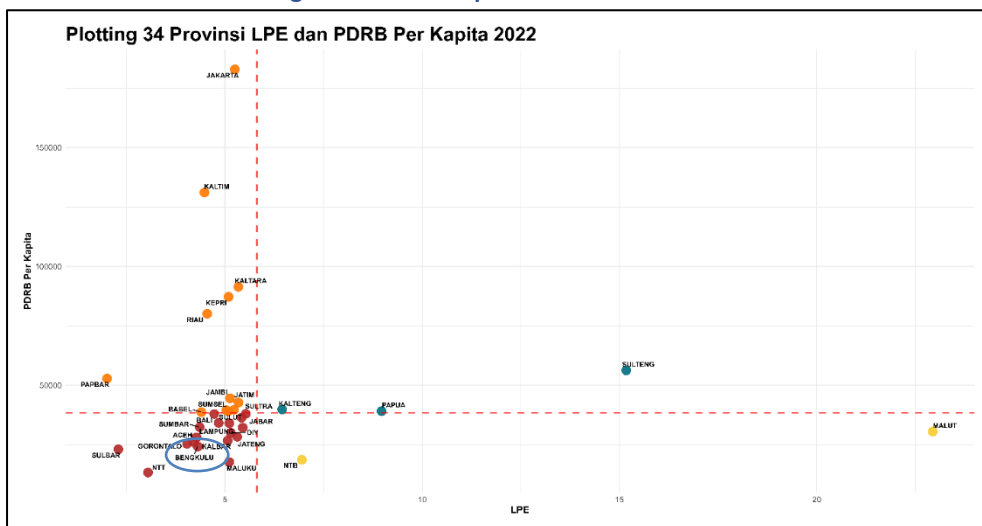
Gambar 3.4 Perbandingan PDRB Per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013



Gambar 3.5 Perbandingan PDRB Per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019



Gambar 3.6 Perbandingan PDRB Per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023



Pada tahun 2013 hingga tahun 2022, Provinsi Aceh tidak mengalami perubahan kuadran (kuadran III). Pada tahun 2013, Provinsi Aceh berada pada posisi dimana capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita dibawah rata-rata. Capaian LPE Aceh pada tahun 2013 sebesar 2,16 persen, sedangkan PDRB per kapita sebesar Rp29.339.210,-. Pada tahun 2013 LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi struktur PDRB Aceh dengan distribusi sebesar 26,58 persen. Sedangkan distribusi sektoral terbesar lainnya yaitu, LU Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,43 persen), dan LU Pertambangan dan Penggalian (12,15 persen). Jika dilihat lebih detail, maka sub

sektor tanaman perkebunan, tanaman pangan, serta perikanan mendominasi dalam struktur LU dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Di sisi lain, sub sektor Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi masih menjadi sub sektor yang berkontribusi signifikan dalam LU Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2013.

Seiring waktu, perekonomian Provinsi Aceh pada tahun 2019 mulai menunjukkan perkembangan dibandingkan tahun 2013. Kendati masih berada pada kuadran yang sama, namun capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita pada tahun 2019 mulai mendekati dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2019, perekonomian Provinsi Aceh tumbuh sebesar 4,15 persen dan PDRB per kapita sebesar Rp36.853.590,-. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2019 didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha kecuali LU Industri Pengolahan yang tumbuh negatif 1,07 persen. Adapun pertumbuhan sektoral tertinggi pada tahun 2019 adalah LU Pengadaan Air merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 27,25 persen; diikuti Jasa Keuangan sebesar 12,58 persen; Jasa Pendidikan sebesar 8,65 persen dan Jasa Lainnya sebesar 8,07 persen. Selama tahun 2013 hingga 2019 struktur perekonomian Aceh menurut lapangan usaha tidak menunjukkan berarti. Perekonomian Aceh masih didominasi oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 29,54 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 15,51 persen; Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,25 persen; dan Konstruksi sebesar 9,62 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Aceh mencapai 64,92 persen. Dilihat dari sisi kontribusi sektoral, terlihat sepanjang tahun 2013 hingga 2019 terjadi pergeseran sektoral terutama untuk LU Pertambangan dan Penggalian yang tidak lagi menjadi 3 besar sektor dengan kontribusi tertinggi di Provinsi Aceh.

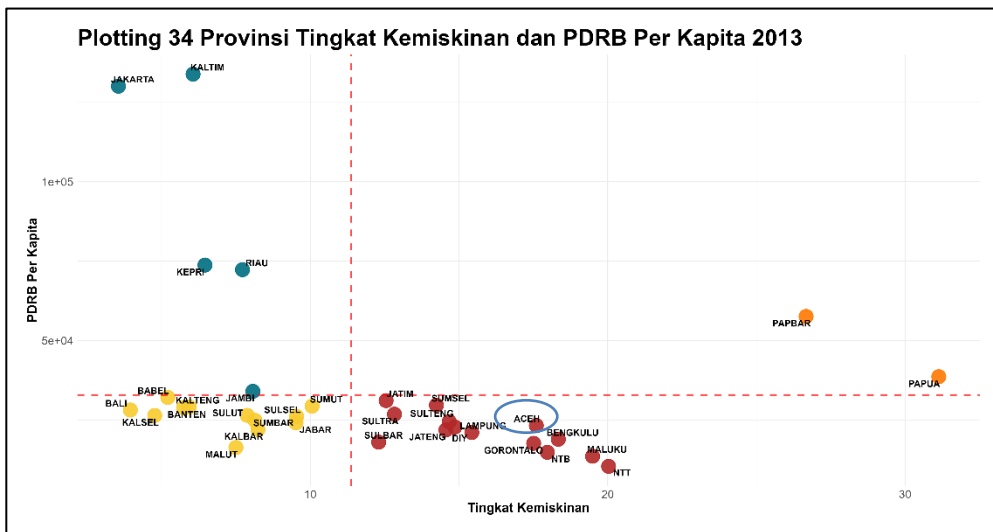
Sementara pada tahun 2022 Provinsi Aceh tetap berada pada kuadran yang sama. Kendati menunjukkan tren yang positif pasca pandemi Covid-19 namun dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita masih berada dibawah rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama tahun 2022 (*c-to-c*) tumbuh sebesar 4,21 persen. Tren positif ekonomi Aceh didorong oleh kinerja 15 lapangan usaha yang tumbuh positif khususnya kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan kinerja pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2022 atau tumbuh sebesar 32,4 persen. Kinerja LU penopang sektor pariwisata tersebut mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati kinerja LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum selama 2 tahun terakhir sempat mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2022 mulai menunjukkan adanya gairah pada sektor pariwisata Aceh. Hal ini terlihat pada kenaikan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan jumlah penumpang yang tiba di Provinsi Aceh terutama untuk angkutan udara. Pasca pandemi Covid-19 atau pada tahun 2022, menunjukkan distribusi LU Pertambangan dan Penggalian kembali menjadi salah satu sektor dengan kontribusi sektoral terbesar ketiga di Provinsi Aceh.



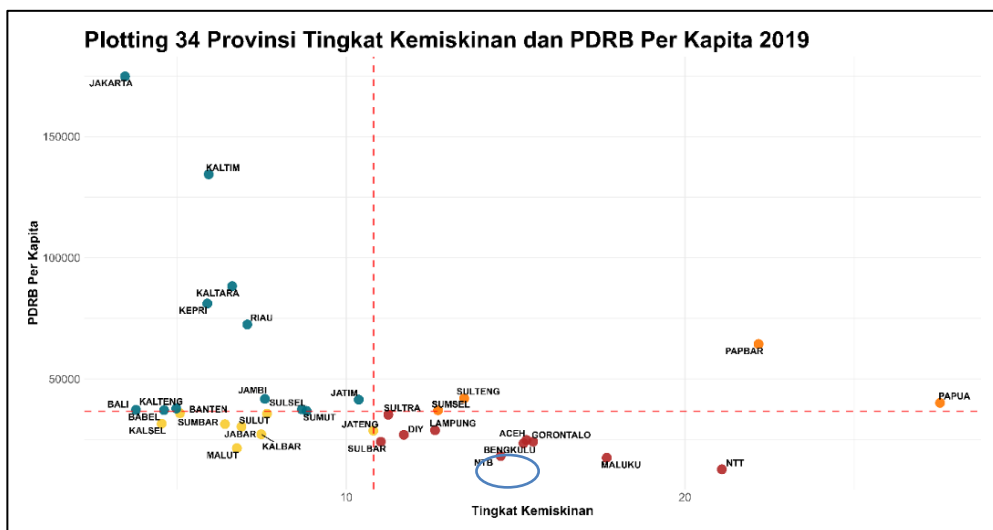
1.4.2 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Kemiskinan

Analisis kuadran kedua, merupakan perbandingan antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan. Dari hasil kuadran dibawah menunjukan selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2022 persebaran provinsi terbanyak berada pada kuadran bawah yaitu kondisi per kapita rendah dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Adapun Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Riau, dan Riau merupakan provinsi yang berada pada kondisi ideal yaitu memiliki PDRB perkapita di atas rata-rata nasional dengan tingkat kemiskinan yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

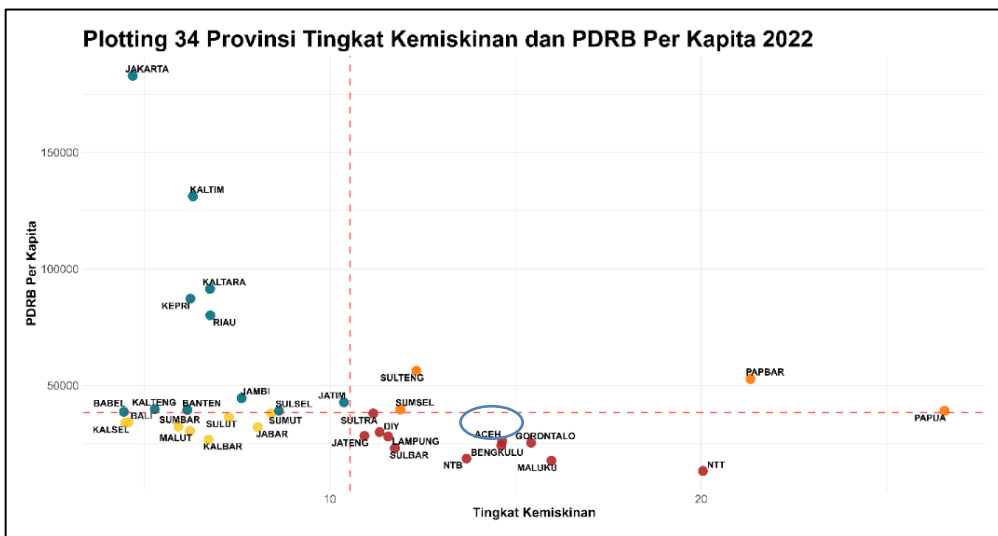
Gambar 3.7 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Kemiskinan Tahun 2013



Gambar 3.8 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Kemiskinan Tahun 2019



Gambar 3.9 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Kemiskinan Tahun 2022



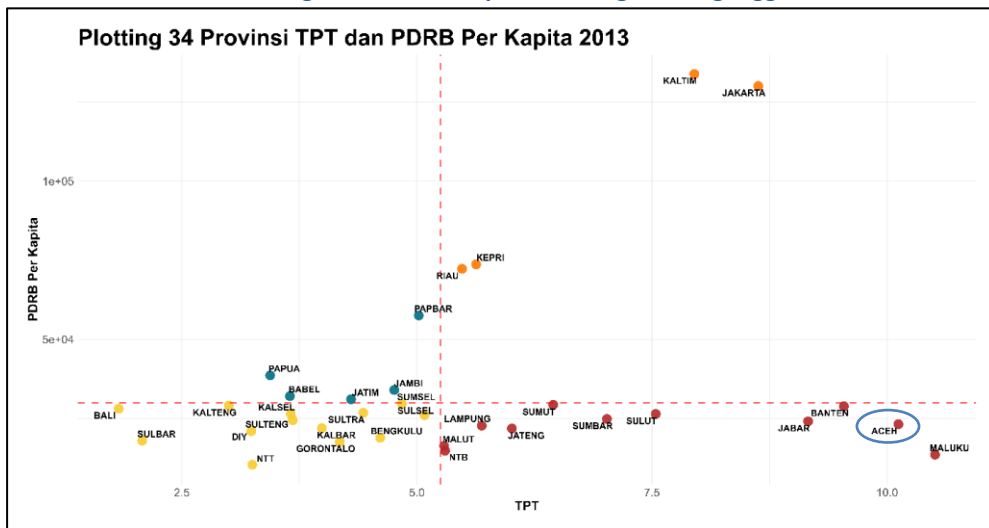
Untuk Provinsi Aceh, selama periode 2013 hingga 2022 berada di kuadran yang sama atau memiliki kondisi yang sama yaitu PDRB per kapita yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi diatas rata-rata. Tingkat kemiskinan Provinsi Aceh pada Maret 2013 mencapai 17,6 persen, kemudian menurun pada tahun 2019 yang mencapai 15,01 persen. Dalam perkembangannya angka kemiskinan di daerah perdesaan relatif lebih besar dibandingkan dengan penduduk miskin di daerah perkotaan. Kendati terus menunjukkan adanya tren yang menurun, namun sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 tingkat kemiskinan Aceh selalu menjadi yang tertinggi di wilayah Sumatera. Masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Aceh tidak terlepas dari sejarah masa lalu dimana dampak dari konflik bersenjata dan bencana alam gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi pada tahun 2004 lalu. Upaya penurunan kemiskinan yang dilakukan di Provinsi Aceh dapat dikatakan cukup baik, mengingat sejak tahun 2004 hingga saat ini tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh telah turun 13,92 poin persentase. Namun demikian, tetap dibutuhkan upaya yang lebih optimal dan progresif dalam mencapai penurunan angka kemiskinan ke level *single digit*.

1.4.3 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran

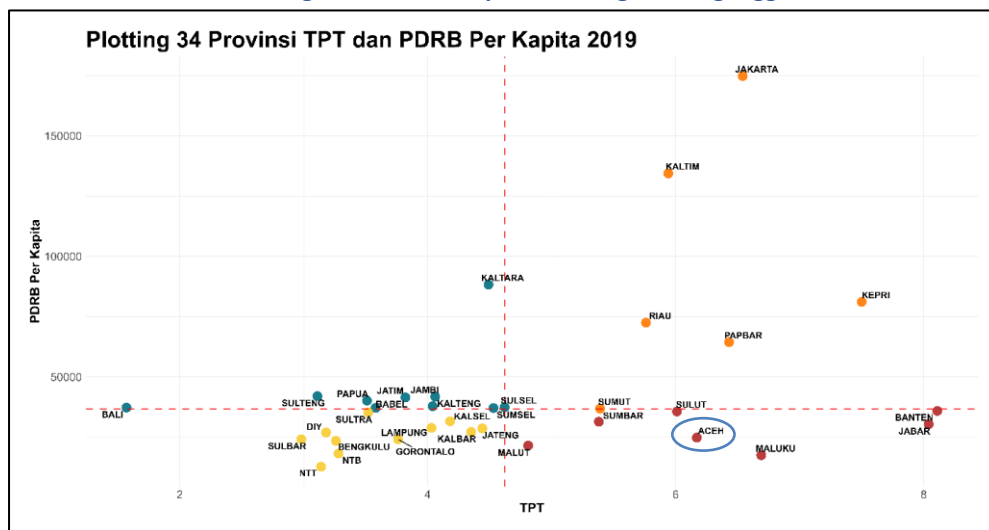
Analisis kuadran ketiga, merupakan perbandingan antara PDRB perkapita dan tingkat pengangguran terbuka. Dari hasil kuadran dibawah menunjukkan sebagian besar provinsi dalam kurun tahun 2013-2022 berada pada kuadran II atau pada kondisi TPT yang cukup baik namun PDRB per kapita di bawah capaian nasional. Pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara, Riau, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kep.

Bangka Belitung berada pada kondisi ideal yaitu kondisi PDRB perkapita lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dengan TPT yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

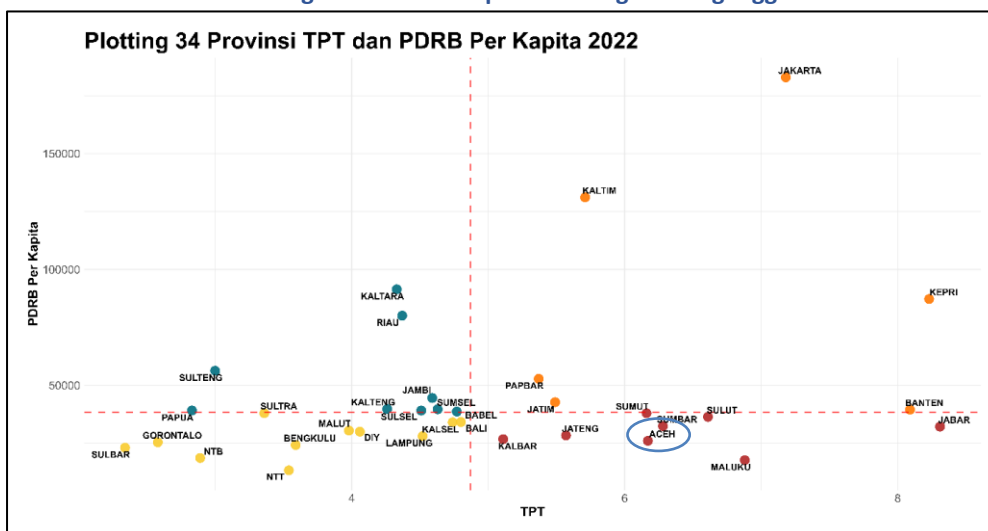
Gambar 3.10 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Tahun 2013



Gambar 3.11 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Tahun 2019



Gambar 3.12 Perbandingan PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Tahun 2022



Sebagian besar provinsi dalam kurun tahun 2013-2022 berada pada kuadran II atau pada kondisi TPT yang cukup baik namun PDRB per kapita dibawah capaian nasional. Pada tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara, Riau, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kep. Bangka Belitung berada pada kondisi ideal yaitu kondisi PDRB per kapita lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dengan TPT yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Dalam kurun waktu 2013 hingga 2022, Provinsi Aceh tidak mengalami pergeseran kuadran. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, capaian PDRB per kapita dan TPT selalu berada di kuadran IV atau dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2013 capaian TPT Aceh sebesar 10,12 persen, turun menjadi 6,17 persen pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 membuat terjadinya peningkatan TPT pada tahun 2020 mencapai 6,59 persen. Sementara pada tahun 2021 hingga 2022 mulai kembali menunjukkan adanya tren penurunan. Pada tahun 2022 capaian TPT Aceh sebesar 6,17 persen atau berada pada posisi yang sama dengan tahun 2019 atau sebelum pandemi Covid-19. Dilihat dari kontribusi sektoral terhadap serapan tenaga kerja atau upaya penurunan TPT di Provinsi Aceh; LU pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dengan serapan tenaga kerja terbesar di Provinsi Aceh. Serapan tersebut sejalan dengan kontribusi LU pertanian yang juga menjadi yang tertinggi dalam *share* struktur ekonomi Aceh.

3. 5. Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa isu strategis Provinsi Aceh, yaitu:

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi terutama di wilayah perdesaan.

Kendati terjadi penurunan tingkat kemiskinan selama beberapa tahun terakhir, Aceh masih memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera dan merupakan yang tertinggi ke-6 secara nasional. Adapun tingkat kemiskinan berdasarkan daerahnya, tingkat kemiskinan di daerah perdesaan masih *double digit* (16,92 persen), sedangkan di daerah perkotaan cenderung lebih rendah atau sudah *single digit* (9,79 persen).

2. Belum optimalnya realisasi investasi (PMA dan PMDN) terutama pada sektor unggulan daerah.

Realisasi investasi Aceh pada tahun 2022 berada pada peringkat 27 dari 34 provinsi dengan realisasi investasi sebesar Rp6,2 triliun. Investasi hilirisasi berbasis SDA, terutama di sektor perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya seperti migas, belum mencapai potensi yang ideal. Selain itu, investasi daerah juga masih tergolong minim untuk sektor non basis seperti pariwisata dan perdagangan di tengah potensi yang terus berkembang.

3. Masih kurangnya nilai tambah dan diversifikasi ekonomi serta belum optimalnya pengembangan kawasan strategis.

Nilai tambah terutama dari sektor basis seperti pertanian dan migas masih tergolong minim. Minimnya nilai tambah ekonomi di Provinsi Aceh dapat menciptakan tantangan serius dalam optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketergantungan pada tahap awal produksi atau ekspor bahan mentah menandakan rendahnya nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh ekonomi daerah. Sumber daya lokal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan produk dan layanan bernilai tinggi. Dampaknya mencakup rendahnya daya saing produk lokal di pasar global, kurangnya pengembangan industri manufaktur, dan tidak maksimalnya peningkatan pendapatan masyarakat karena terbatasnya kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi. Di sisi lain, perekonomian Aceh juga masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor primer. Di sisi lain, pengembangan kawasan strategis yang berada di Provinsi Aceh seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan strategis lainnya masih belum optimal terutama dalam hal mendatangkan dan merealisasikan investasi di kawasan strategis tersebut. Beberapa kawasan strategis di Provinsi Aceh diantaranya Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, KEK Halal Barsela, Kawasan Strategis Pariwisata Dataran Tinggi Gayo Alas (DTGA), dan KEK Pariwisata Singkil Simeulue.

4. Belum meratanya akses dan kualitas serta mutu pelayanan pendidikan.

Beberapa daerah di Provinsi Aceh masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah yang kurang memadai, kekurangan fasilitas pembelajaran, dan kurangnya aksesibilitas terhadap sekolah bagi masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, rasio guru terhadap murid khususnya di daerah terpencil Aceh yang masih dibawah rata-rata nasional. Adapun Provinsi Aceh juga dihadapi dari sisi kekurangan guru yang bersertifikasi, dimana dari target 80 persen guru yang tersertifikasi, namun baru 43 persen yang tersertifikasi (2021). Selain itu, capaian kompetensi siswa terutama di daerah terpencil masih di bawah standar yang ditetapkan serta belum meratanya akses dan kualitas terhadap fasilitas pendidikan yang memadai di daerah-daerah terpencil, seperti ruang kelas yang memadai serta prasarana penunjang belajar lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan.

5. Tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi serta penanganan kesehatan ibu dan anak (KIA) yang belum optimal.

Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi kelima di Indonesia yakni mencapai hingga 31,2 persen. Provinsi Aceh hanya mampu memangkas angka stunting sebesar 2 poin persentase dimana pada SSGI 2021, prevalensi stunting di Provinsi Aceh mencapai 33,2 persen. Prevalensi stunting di Aceh tergolong tinggi karena masih melebihi ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20 persen. Berdasarkan wilayahnya, terdapat 12 kabupaten/kota di Aceh yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi. Kota Subulussalam merupakan wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Aceh pada 2022 yakni mencapai 47,9 persen, naik sebesar 6,1 poin persentase dari 2021 sebesar 41,8 persen. Sementara Kabupaten Aceh Utara menduduki peringkat kedua di Aceh dengan prevalensi stunting 38,3 persen, disusul Kabupaten Pidie Jaya dengan prevalensi 37,8 persen. Angka Kematian Ibu (AKI) di provinsi Aceh tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 223 per 100,000 kelahiran hidup. Cakupan pelayanan ibu nifas cenderung berfluktuasi, dimana tahun 2021 dengan cakupan sebesar 77 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78 persen. Cakupan ibu hamil mendapatkan tablet fe3 (90 tablet) masih sebesar 81 persen. Jumlah kematian neonatal di provinsi Aceh tahun 2021 sebanyak 858 kasus atau 9 per 1000 kelahiran hidup, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah kasus sebanyak 792 kasus dengan angka kematian neonatal 8 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tahun 2021 sebesar 11 per 1000 kelahiran hidup atau mengalami peningkatan dibandingkan kondisi empat tahun lalu (2-17-2020) yang hanya sebesar 9 per 1000 kelahiran hidup. Cakupan pelayanan kesehatan bayi dalam periode 3 tahun (2019-2021) di

provinsi Aceh mengalami penurunan yang signifikan dari 84 persen di tahun 2017 dan hanya 49 persen di tahun 2021.

6. Cakupan infrastruktur dasar dan konektivitas yang belum memadai dan merata.

Cakupan kondisi infrastruktur terutama yang terkait pelayanan dasar seperti sanitasi layak masih belum merata. Dimana pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang belum memiliki sanitasi layak masih sebesar 22,52 persen. Sementara kondisi jalan Provinsi Aceh dalam keadaan mantap masih sebesar 59 persen.

7. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana terutama di wilayah pesisir

Kondisi alam yang kompleks telah menjadikan Aceh sebagai salah satu provinsi dengan indeks risiko bencana berkategori tinggi di Indonesia dengan indeks 160. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dilaporkan sebanyak 2.739 kejadian bencana atau rata-rata 548 kejadian bencana per tahun. Kabupaten Bener Meriah, Gayo Lues, dan Nagan Raya, serta Kota Langsa dan Kota Sabang memiliki indeks risiko bencana kategori sedang. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya termasuk kategori tinggi.

8. Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Kendati terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja dan partisipasi angkatan kerja, serta peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, masih terdapat tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini terutama tercermin dari dominasi pekerjaan di sektor informal (59,86 persen) dibandingkan dengan sektor formal (40,14 persen), serta adanya peningkatan dalam persentase pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan sekolah menengah atas/kejuruan serta tinggi. Ini menjadi indikasi belum optimalnya penciptaan tenaga kerja di sektor yang memiliki produktivitas dan nilai tambah tinggi seperti manufaktur dan jasa.

9. Masih terbatasnya daya dukung dalam mencapai tingkat kemandirian pangan.

Provinsi Aceh masih menghadapi kendala atau hambatan dalam upaya untuk mencapai tingkat kemandirian pangan yang memadai. Aceh masih sangat tergantung pada pasokan pangan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama untuk komoditas beras, jagung, kedelai, dan komoditas lainnya. Ini terjadi karena masih adanya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar wilayah dan belum adanya kemampuan untuk memproduksi atau menyediakan cukup pangan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Provinsi Aceh. Hal ini mencakup aspek produksi, produktivitas, distribusi, dan aksesibilitas pangan. Dimana hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pangan di tingkat lokal atau regional.

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”





*Kementerian PPN/
Bappenas*

EPD

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi Aceh pada 2023 mencatat peningkatan positif yang telah melampaui target RKP dan RKPD. Meskipun beberapa sektor berkontraksi, pertumbuhan positif didorong terutama oleh sektor perdagangan, reparasi mobil, konstruksi, dan jasa lainnya.
- Tingkat kemiskinan di Aceh menurun pada Maret 2023 kendati masih di atas rata-rata nasional. Penurunan ini didorong oleh kinerja ekonomi yang terus membaik serta melalui kebijakan intervensi pemerintah. Di sisi lain, meski angka kemiskinan ekstrem menunjukkan penurunan, tetapi perlu perhatian lebih lanjut untuk mencapai target nasional.
- TPT di Aceh mengalami penurunan pada Agustus 2023. Meskipun mengalami penurunan, masih terdapat gap pencapaian TPT yang cukup besar antara perkotaan dan perdesaan. Adapun serapan tenaga kerja juga masih terkonsentrasi di sektor non formal.
- IPM Provinsi Aceh tahun 2023 mencapai 74,7, naik 0,59 poin dari tahun sebelumnya, dengan kategori "tinggi." Peningkatan didorong oleh semua komponen, meskipun beberapa masih di bawah tingkat nasional.
- Provinsi Aceh mencapai kinerja optimal (skor 3) pada tiga indikator utama pembangunan (LPE, TK, dan TPT) berdasarkan perbandingan dengan target RKP 2023. Dalam perbandingan dengan target RKPD 2023, hanya indikator TPT yang belum mencapai target, sedangkan empat indikator lainnya (LPE, TK, rasio gini, dan IPM) melebihi 100 persen kinerja. Analisis perbandingan dengan realisasi tahun 2022 menunjukkan tren positif pada LPE, TK, TPT, dan IPM, sementara rasio gini mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan dan TPT memiliki capaian yang masih lebih tinggi dibandingkan wilayah setara.
- Penilaian skor dari aspek fisik di Provinsi Aceh belum cukup optimal, terlihat dari indikator mantap jalan dan IRBI. Sedangkan dari aspek struktur ekonomi tergolong tidak optimal, terutama kinerja pada proporsi sektor manufaktur, realisasi PMA dan PMDN, serta pertumbuhan PMA dan PMDN yang tergolong masih rendah.
- Penilaian skor dari aspek Sosial-Budaya di Provinsi Aceh sudah cukup optimal, namun masih terdapat tantangan terutama ditunjukkan dari indikator Indeks Ketahanan Sosial Budaya (IPK) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang memiliki skor yang rendah. Sedangkan dari aspek Demografi tergolong belum cukup optimal, ditunjukkan dari pada indikator Proporsi Penduduk Usia Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang masih berkinerja rendah.

- Penilaian skor dari aspek fiskal sudah cukup optimal, namun indikator kapasitas fiskal daerah tergolong masih rendah. Sedangkan pada aspek institusi juga tergolong cukup optimal, namun tetap perlu perbaikan dalam hal akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan, serta peningkatan kapabilitas inovasi daerah.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan isu strategis di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi bagi pembangunan daerah Provinsi Aceh sebagai berikut:

1. Mendorong penurunan angka kemiskinan berbasis penguatan ekonomi desa dan peningkatan pelayanan dasar di daerah perdesaan. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.
 - Penguatan program pengentasan kemiskinan perdesaan melalui pengimplementasian program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses penduduk di daerah perdesaan serta peningkatan alokasi anggaran untuk program bantuan sosial dan ekonomi di wilayah perdesaan dengan memastikan efektivitas jenis bantuan dan validitas data calon penerima bantuan
 - Pengembangan sektor ekonomi lokal melalui penggalakan program pengembangan ekonomi lokal dengan fokus pada kelompok UMKM dan sektor pertanian, perkebunan, kelautan, dan industri kreatif. Selain itu, perlu mendorong fasilitasi investasi pada sektor-sektor ekonomi lokal yang berpotensi meningkatkan lapangan kerja di daerah perdesaan. Lalu juga melalui penguatan peran institusi ekonomi lokal (koperasi dan kelompok usaha) dalam mewadahi pengembangan sektor ekonomi lokal. Fasilitasi akses masyarakat perdesaan ke pasar-pasar lokal dan regional untuk meningkatkan penjualan produk lokal.
 - Pengembangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan melalui penyediaan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal di daerah perdesaan.
 - Mendorong pemanfaatan teknologi dan fasilitasi inovasi pada bidang pertanian melalui sosialisasi praktik pertanian modern dan berkelanjutan di wilayah perdesaan serta mendukung teknis dan permodalan untuk mendorong diversifikasi hasil pertanian dan pengolahan produk lokal.
 - Peningkatan akses infrastruktur dasar yang meliputi sarana prasarana terkait pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi
 - Penguatan konektivitas di perdesaan dengan menyediakan akses internet dan layanan telekomunikasi yang memadai serta pengimplementasian

program pelatihan untuk pemanfaatan teknologi informasi di tingkat masyarakat perdesaan.

2. Meningkatkan fasilitasi dan daya saing investasi melalui penguatan pelayanan keinvestasian daerah. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.

- Mendorong perbaikan regulasi investasi di daerah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan insentif yang menarik bagi investor.
- Melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi investasi untuk mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan.
- Membuat forum dialog dengan para pelaku usaha dalam memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh investor.
- Meningkatkan promosi investasi yang intensif untuk menarik perhatian investor baik dari dalam maupun luar negeri.
- Sosialisasi dan penyediaan informasi terkait potensi-potensi sektor unggulan daerah secara jelas dan komprehensif kepada calon investor.
- Membentuk kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk mendorong investasi di sektor unggulan.
- Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kegiatan investasi dan hilirisasi.

3. Mendorong hilirisasi dengan peningkatan proporsi industri dengan nilai tambah tinggi terutama melalui penguatan peran pelaku ekonomi lokal. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.

- Menyediakan insentif pajak dan fasilitas lainnya bagi perusahaan manufaktur.
- Membentuk klaster ekonomi atau kawasan industri dengan fokus pada sektor-sektor unggulan daerah diiringi dengan kebijakan yang dapat mendorong optimalisasi investasi di klaster ekonomi
- Memberikan dukungan khusus kepada UKM untuk meningkatkan nilai tambah produk dan layanan serta memberikan pelatihan dan akses ke teknologi bagi UKM untuk meningkatkan kualitas dan inovasi.
- Membangun kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan fasilitas kredit yang lebih mudah diakses terutama UKM, khususnya pembiayaan untuk pengembangan dan produksi.

- Mendorong kegiatan riset dan pengembangan di sektor-sektor potensial untuk menciptakan produk dan layanan bernilai tinggi melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta.
4. Meningkatkan pemerataan kualitas sarana prasarana pendidikan dan perbaikan tata kelola pendidikan di wilayah terpencil. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.
- Memberikan insentif dan mendorong kebijakan penempatan guru ke daerah terpencil untuk meningkatkan rasio guru-murid.
 - Meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesional kepada guru di daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
 - Memprioritaskan alokasi anggaran untuk membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, termasuk ruang kelas dan prasarana pendukung untuk kegiatan belajar mengajar lainnya.
 - Mengimplementasikan program pendukung siswa di daerah terpencil, termasuk bimbingan dan konseling, untuk meningkatkan capaian kompetensi.
 - Memanfaatkan teknologi untuk mengatasi keterbatasan akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah terpencil.
 - Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung penyediaan fasilitas pendidikan dan program peningkatan kompetensi di daerah terpencil.
 - Melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap mutu pendidikan di daerah terpencil untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
 - Pelibatan peran aktif masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan lokal.
5. Mendorong upaya menyeluruh dan pelibatan seluruh *stakeholders* terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan intervensi kesehatan terpadu dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.
- Mendorong kolaborasi antar sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial, untuk menyelenggarakan program-program terpadu yang mendukung pencegahan stunting.

- Meningkatkan perhatian khusus pada program gizi, seperti pemberian makanan bergizi, pendampingan gizi bagi ibu hamil dan balita, serta edukasi gizi kepada masyarakat.
 - Mendirikan serta menguatkan peran dari tim kerja bersama yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan komunitas lokal, untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program penurunan stunting.
 - Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala.
 - Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program kesehatan, serta memberikan pemahaman tentang praktik gizi yang baik.
 - Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak program dan mengidentifikasi efektivitas program dalam rangka perbaikan.
 - Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, guna memastikan pemeriksaan kesehatan rutin dan penanganan stunting dapat diakses oleh semua.
 - Melatih tenaga kesehatan dan kader kesehatan masyarakat dalam deteksi dini, penanganan, dan pencegahan stunting.
 - Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang stunting, termasuk pentingnya pencegahan, deteksi dini, dan peran setiap individu dalam mendukung pertumbuhan anak.
 - Penerapan pembelajaran bersama antar daerah dalam upaya replikasi dan adaptasi keberhasilan program penurunan prevalensi stunting
6. Prioritasi perbaikan untuk jalan utama penggerak perekonomian daerah dan jalan penghubung intra-daerah. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.
- Prioritasi alokasi anggaran untuk perbaikan jalan utama yang menjadi penggerak perekonomian daerah dan jalan penghubung intra-daerah.
 - Pengembangan pembiayaan perbaikan jalan yang lebih berkelanjutan salah satunya melalui skema kemitraan publik-swasta maupun integrasi pembiayaan penanganan jalan antara pusat dan daerah.
 - Membangun sistem monitoring kondisi jalan memanfaatkan perkembangan IT (aplikasi) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi jalan.

- Peningkatan upaya pemeliharaan preventif
 - Peningkatan kemampuan dan keahlian teknis dalam mengelola serta melakukan perbaikan pada infrastruktur jalan.
7. Penguatan mitigasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengurangan risiko bencana daerah. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.
- Peningkatan infrastruktur dan kapasitas sistem peringatan dini untuk meminimalkan risiko bencana dan peningkatan respon kebencanaan.
 - Penyusunan rencana evakuasi yang efektif dan lakukan pelatihan reguler (berkala) kepada masyarakat di wilayah pesisir untuk meningkatkan kesiapsiagaan.
 - Penerapan zonasi risiko bencana untuk mendukung perencanaan pengembangan wilayah yang aman dari ancaman bencana.
 - Peningkatan kerja sama antar instansi pemerintah (pemda dengan Polri/TNI/Basarnas/BPBD/PMI) dalam hal kesiapsiagaan pada waktu tanggap darurat.
 - Adopsi kebijakan pembangunan terkini melalui bangunan *resilience* (tahan gempa dan tsunami) serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konstruksi yang aman.
 - Penerapan aspek mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan ekonomi.
 - Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat akan risiko bencana dan tindakan preventif
8. Penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui upaya optimalisasi peningkatan investasi pada sektor unggulan daerah terutama pada sektor yang memiliki potensi pengembangan nilai tambah tinggi diiringi peningkatan kualitas SDM secara gradual. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.
- Mendorong peningkatan daya saing investasi daerah melalui pemberian insentif dan pelayanan investasi yang efisien dan efektif khususnya bagi sektor yang memiliki potensi daya serap tenaga kerja yang besar dan berkualitas.
 - Megoptimalkan peran Balai Latihan Kerja sebagai medium yang strategis dalam upaya menciptakan lapangan kerja berkualitas di Provinsi Aceh dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan keterampilan, menghubungkan dunia pendidikan dengan industri, menyediakan informasi tentang pasar kerja, serta memfasilitasi pengembangan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat.

- Mendorong kolaborasi aktif antara institusi pendidikan terutama pendidikan menengah atas/kejuruan serta pendidikan tinggi dalam *men-supply* tenaga kerja berkualitas ke industri secara langsung.
9. Mendorong diversifikasi pangan lokal diiringi peningkatan produktivitas hasil pangan melalui pengembangan sentra produksi pangan dan penguatan peran koperasi pertanian daerah. Berikut beberapa rekomendasi spesifik yang dapat dilakukan.
- Pemerintah Provinsi Aceh perlu mendorong diversifikasi pangan lokal dengan mengidentifikasi komoditas-komoditas pangan alternatif yang cocok untuk dikembangkan, seperti tanaman sereal, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran lokal yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik.
 - Meningkatkan produktivitas hasil pangan melalui penguatan program-program pembinaan dan pendampingan petani untuk menerapkan praktik pertanian modern, penggunaan varietas unggul, teknologi tepat guna, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
 - Melakukan identifikasi lebih lanjut terkait pengembangan sentra-sentra produksi pangan di berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif, fasilitas, dan pendampingan kepada petani di sentra-sentra produksi tersebut untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pangan.
 - Penguatan peran koperasi pertanian dalam upaya meningkatkan produksi, pemasaran, dan nilai tambah hasil pertanian. Ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan manajemen dan teknis kepada anggota koperasi, serta memfasilitasi akses kepada modal, teknologi, dan pasar yang lebih luas.
 - Meningkatkan alokasi pendanaan dalam rangka pengembangan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan-jalan pedesaan, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan, untuk meningkatkan efisiensi produksi, distribusi, dan aksesibilitas pangan lokal.
 - Memperkuat promosi dan pemasaran aktif terhadap produk-produk pangan lokal melalui berbagai media, acara promosi, dan program-program dukungan pasar untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk pangan lokal.

“HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN”





**Kementerian PPN/
Bappenas**



dit.peppdbappenas



Direktorat PEPPD



peppd.bappenas.go.id



**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan Daerah**

**Kedeputan Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan**

Menara Bappenas Lantai 9
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan
Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, 12920



Phone

Cell: (021) 31936207



Email & Online

Email: dit.peppd@bappenas.go.id